

**ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

TAHUN 1999-2003

SKRIPSI



Oleh

Nama : Dhian Pratita Mayasari
Nomor Mahasiswa : 01313059
Jurusan : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2005

**ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 1999-2003**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata I
Program Studi Ekonomi Pembangunan
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Dhian Pratita Mayasari
Nomor Mahasiswa : 01313059
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2005**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 8 Maret 2005

Penulis,

Dhian Pratita Mayasari

PENGESAHAN

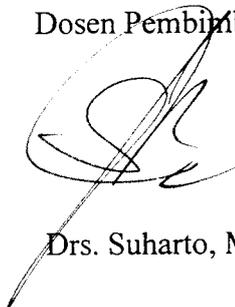
**ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 1999-2003**

Nama : Dhian Pratita Mayasari
Nomor Mahasiswa : 01313059
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, April 2005

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Drs. Suharto, M.Si

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 1999 - 2003**

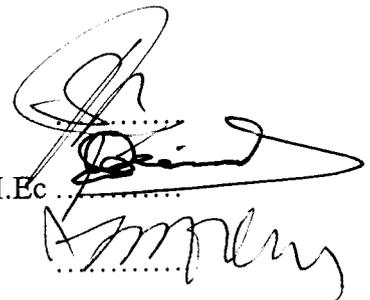
**Disusun Oleh: DHIAN PRATITA MAYASARI
Nomor mahasiswa: 01313059**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 13 April 2005

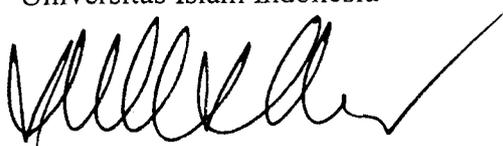
Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Suharto, M.Si

Penguji I : Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec

Penguji II : Dra. Indah Susantun, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA

HALAMAN MOTTO

Orang yang pandai adalah yang merendahkan diri
dan beramal sebagai persiapan setelah mati

Sedang orang bodoh adalah yang memperturutkan hawa nafsunya
namun kemudian berharap muluk kepada Allah.

(HR. Turmudzi. Ibnu Majal dan Ahmad)

Masa lalu yang terburukpun jangan kau toleh lagi,
karena tak ada kata terlambat untuk berbenah diri.

(Penulis)

Cinta sejati adalah jika kita selalu memikirkannya
dan memberi perhatian dengan tulus, jika kita tetap peduli padanya
walau dia sudah lupa dan tidak lagi peduli sama kita
dan kita tetap tersenyum ketika dia bersama orang yang dicintainya.

(KHALIL GIBRAN)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukurku, karya ini

kupersembahkan untuk:

- ❖ *Ayahanda dan Ibundaku tercinta,
Pak, Ma....aku bisa seperti ini
karena Bapak dan Mama.....*
- ❖ *Kakak-kakakku tersayang yang
memberiku arahan dan semangat
untuk keberhasilanku.....*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ ANALISIS RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 1999-2003”. Tak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materiil, khususnya kepada :

1. Bapak Drs. H . Suwarsono, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Drs. Suharto, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang memberikan kemudahan, meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Semua dosen dan karyawan khususnya di jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Seluruh karyawan/staf perpustakaan di Fakultas Ekonomi, Dinas Perhubungan Gunungkidul, BKD Gunungkidul dan BPS Yogyakarta, yang telah membantu dalam pengumpulan data-data dan bahan skripsi ini.
5. Mas Ismanto di jurusan EP, terima kasih atas arahan dan strategi kuliah yang baik, makasih ya Mas.
6. Ayahanda Basuki Rochim, Bsc, SIP dan Ibundaku Mujirahayu, SIP tercinta, terima kasih atas do'a yang tiada henti untukku, kasih sayang dan bimbingan yang sangat berharga. Almarhumah "Simbah Rebi", Mbah..Tita sudah lulus.
7. Kakak-kakakku tersayang, Purnomo Henri Legowo, SH dan Yohan Aji Chandra, cSH (calon SH), terima kasih atas dorongan, bantuan tenaga dan pikiran serta kebersamaan kita dalam suka maupun duka. Si Om, Martin dan Mba' Yuning yang sudah menjadikan rumahku ramai.
8. Asik Fahdi, terima kasih atas kesabaran, semangat, cinta dan kasih sayang untukku, jadilah yang terbaik...

9. Yah ICI yang selalu menjadi ‘teman’ terbaikku, terimakasih atas petuah-petuah bijakmu, teman-teman lawasku ; 54N13HP (TL), Nurdian, Pop. Cah SUIT jaman SMA, Best friend InDul..Dul..Dul, anak Kost 151 semuanya.
10. Sobat-sobatku di EP, special 4 the couple “Bayu&Liza” makasih kerjasamanya yang tak terlupakan. Sodiq, Heru, Aa’ Siffa, Wahyuningsih sekosan, Yayak (sesama AsDos), Rini n the gank, Asti PW, Diena, Hekal dkk, Mbek makasih mantranya, teman-teman KKN ku, Ba Tri, Lia, Indah dan Yeni.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, sebagai manusia dengan kelebihan dan kekurangannya, masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu karya yang berguna bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Maret 2005

Penulis

Dhian Pratita Mayasari

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Kata Pengantar.....	vii
Halaman Daftar Isi.....	x
Halaman Daftar Tabel.....	xiii
Halaman Daftar Gambar.....	xv
Halaman Abstrak.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1.
1.2 Rumusan Masalah.....	5.
1.3 Tujuan Penelitian.....	6.
1.4 Manfaat Penelitian.....	7.
1.5 Sistematika Penulisan.....	7.
 BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
2.1 Struktur dan Karakteristik Fisik Dasar.....	10.

2.2 Keadaan Sosial Kepedudukan.....	12.
2.3 Keadaan Ekonomi.....	16.
2.4 Badan Keuangan Daerah.....	24.
2.5 Sistem Jaringan Jalan dan Jasa Transportasi.....	32.
2.6 Dinas Perhubungan.....	36.
BAB III TELAAH PUSTAKA	
BAB IV LANDASAN HUKUM DAN TEORI	
4.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	43.
4.2 Retribusi Daerah.....	46.
4.3 Ketentuan Umum Retribusi Daerah.....	48.
4.4 Kinerja Pungutan Retribusi Daerah.....	53.
4.5 Retribusi Terminal.....	60.
BAB V METODE PENELITIAN	
5.1 Sumber Data.....	62.
5.2 Metode Analisis Data.....	62.
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
6.1 Analisis Data.....	69.
6.2 Penerimaan PAD dan Retribusi Terminal.....	73.
6.3 Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap PAD.....	76.
6.4 Upaya Pemungutan Retribusi Terminal.....	79.
6.5 Efektifitas Retribusi Terminal.....	81.

6.6 Efisiensi Retribusi Terminal.....83.

6.7 Analisis Trend.....86.

BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1 Kesimpulan.....92.

7.2 Implikasi.....94.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Penerimaan Retribusi Terminal dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003.....4
Tabel 2.1	Batas Wilayah Kabupaten Gunungkidul.....11
Tabel 2.2	Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul Dirinci MenurutKecamatan.....12
Tabel 2.3	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun1999-200313
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Banyaknya Desa/Kelurahan Per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003.....15
Tabel 2.5	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003 (Juta Rupiah).....17
Tabel 2.6	Pertumbuhan PAD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 1994-2003.....20
Tabel 2.7	Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 1994-2003.....21
Tabel 2.8	Pertumbuhan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 1994-2003.....23

Tabel 2.9	Data Transportasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003.....	35
Tabel 4.1	Struktur dan Tarif Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004.....	60
Tabel 6.1	Pertumbuhan PAD dan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003.....	71
Tabel 6.2	Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003.....	75
Tabel 6.3	Tingkat Upaya Pemungutan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003 (Juta Rupiah).....	77
Tabel 6.4	Efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003.....	79
Tabel 6.5	Efisiensi Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003.....	82
Tabel 6.6	Perhitungan Trend Linier Penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 1994-2003.....	85
Tabel 6.7	Proyeksi Penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004-2013.....	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	
Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul.....	31
Gambar 2.2	
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.....	38

ABSTRAKSI

Skripsi ini disusun sebagai hasil penelitian tentang kontribusi retribusi terminal dan kinerja retribusi retribusi terminal Kabupaten Gunungkidul dengan acuan tahun anggaran 1999-2003. Penulis menggunakan analisis yang mengukur kontribusi, tingkat upaya, efektifitas dan efisiensi retribusi terminal serta analisis trend untuk memperkirakan penerimaan retribusi terminal kabupaten Gunungkidul pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kontribusi retribusi terminal Kabupaten Gunungkidul masih kecil dan masih perlu untuk di tingkatkan lagi, begitu pula dengan tingkat upaya retribusi terminalnya. Sedangkan efektifitas sudah bisa digolongkan pada kinerja pemungutan retribusi terminal yang efektif dan untuk efisiensi, digolongkan pada pemungutan retribusi terminal yang sangat efisien. Hasil analisis trend, menunjukkan akan terjadi kenaikan retribusi terminal tiap tahunnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Runtuhnya ekonomi Indonesia sudah terlihat sejak terpuruknya nilai rupiah sebelum puncak krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, adalah akibat sentralisme kekuasaan, termasuk dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi. Krisis ekonomi yang puncaknya terjadi pada tahun 1998, tentunya membawa berbagai macam dampak serta perubahan-perubahan di Negara ini.

Perubahan sistem pemerintahan merupakan salah satu perubahan yang mendasar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Pada tahun 1999, telah ditetapkan undang-undang tentang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Saat ini, undang-undang Otonomi Daerah telah diperbarui dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengandung inti dari konsep otonomi daerah yaitu upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah luas. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat terwujud secara nyata

dan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memiliki kesinambungan fiskal secara nasional.

Daerah otonom selain mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri juga berwenang menarik berbagai jenis pajak dan retribusi yang terdapat didaerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan palaksanaan pembangunan. Untuk mendukung kemampuan ekonomi daerah dalam era otonomi dituntut kesiapan daerah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi yang dimiliki serta pemberdayaan potensi daerah seoptimal mungkin, guna menentukan serta menetapkan rencana pembangunan daerahnya. Dalam kapasitas yang demikian maka diperlukan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dukungan kebijakan Pemerintah Daerah agar pelaksanaannya menjadi terarah dan terpadu.

Dari sisi pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut sumber penerimaan keuangan daerah berasal dari salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan penerimaan yang lain adalah dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan yang sah. Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Kabupaten Gunungkidul, sebagai salah satu daerah otonom, melalui otonomi tersebut diharapkan pemerintahnya akan lebih mandiri baik fiskal untuk membiayai pembangunan maupun di dalam membenahi manajemen pemerintahan termasuk aparturnya, dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam mengatur daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul harus mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan anggaran belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik atau masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua variabel terpenting yang membentuk PAD suatu daerah. Di Kabupaten Gunungkidul penerimaan retribusi daerah lebih besar dari penerimaan pajak daerah. Dan dari berbagai macam pendapatan dari retribusi yang dipungut yaitu ; retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, retribusi terminal di Kabupaten Gunungkidul menjadi sumber pendapatan yang cukup berarti bagi Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Gunungkidul, retribusi terminal merupakan sumber penerimaan yang potensial dalam retribusi daerah dan apabila dimaksimalkan akan mampu mendorong kenaikan PAD. Dengan kondisi geografis Kabupaten Gunungkidul adalah perbukitan dan penduduknya menyebar jauh dari pusat

ekonomi daerah, maka mobilitas penduduk dirasa sangat penting dalam aktivitas kegiatan ekonomi penduduknya. Pengukuran pendapatan dari adanya mobilitas tersebut dapat diukur melalui penerimaan retribusi terminal Kabupaten Gunungkidul.

Dari data yang sudah ada terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal cenderung lebih besar dari target yang telah direncanakan kecuali pada tahun anggaran 1999/2000 hal itu disebabkan dari dampak krisis ekonomi yang puncaknya terjadi pada tahun 1998, perhitungan tahun fiskal menjadi tahun kalender dan pada tahun 2003 yang dikarenakan dampak kenaikan BBM sehingga banyak angkutan yang berhenti beroperasi. Perkembangan penerimaan retribusi terminal dan PAD selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan Retribusi Terminal dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003

Tahun Anggaran	Target Retribusi Terminal	Realisasi Retribusi Terminal	Pendapatan Asli Daerah
1999/2000	59.688.000,00	55.266.000,00	5.409.513.105,45
2000	44.766.000,00	45.091.600,00	5.719.379.104,90
2001	65.664.000,00	66.415.100,00	8.852.286.282,60
2002	72.900.000,00	74.626.400,00	13.486.859.839,85
2003	96.860.000,00	91.949.500,00	17.481.692.174,84

Sumber data : BKD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

Penerimaan daerah dari retribusi harus terus ditingkatkan sebagai sumber yang kontribusinya cukup berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun dalam usaha peningkatan tersebut tentunya terdapat adanya berbagai hambatan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah daerah dengan instansi lain yang terkait dan yang terpenting adalah dari masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran masalah tersebut, maka penulis tertarik pada retribusi terminal sebagai obyek penelitian dengan judul “ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 1999-2003”

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat begitu luasnya topik penelitian dan berbagai batasan yang menjadi kesempurnaan penelitian itu, juga berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan melihat peranan, aktivitas, dan permasalahan retribusi terminal di Kabupaten Gunungkidul. Penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan retribusi terminal di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Seberapa besar kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul?

- b. Seberapa besar tingkat upaya pemungutan Retribusi terminal Kabupaten Gunungkidul?
- c. Bagaimana efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul?
- d. Bagaimana efesiensi Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul?
- e. Bagaimana perkembangan penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul pada tahun berikutnya atau pada masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- b. Untuk mengetahui berapa besar upaya pemungutan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul.
- c. Untuk mengetahui efektifitas Retribusi Terminal kabupaten Gunungkidul.
- d. Untuk mengetahui efesiensi Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul.
- e. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul dimasa yang akan datang, sehingga dapat

dihitung jumlah target penerimaan Retribusi Terminal yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menilai kinerja pemungutan retribusi terminal dan upaya-upaya peningkatan PAD.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mengambil kebijakan pemungutan retribusi dan peranannya dalam peningkatan PAD.
- c. Sebagai salah satu sumber informasi yang dapat memberikan gambaran dan kemudahan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, setiap bab dapat dirinci ke dalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar, terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah penulisan skripsi ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Bab ini akan membahas tentang Struktur dan Karakteristik Fisik Dasar, Keadaan Sosial Kependudukan, Keadaan Ekonomi, Badan Keuangan Daerah (BKD), Sistem Jaringan Jalan dan Jasa Transportasi, Dinas Perhubungan.

BAB III. TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dimana hasil penelitian tersebut menjadi acuan untuk penelitian berikutnya khususnya penelitian ini.

BAB IV. LANDASAN HUKUM DAN TEORI

Bab ini membahas tentang Sumber-sumber Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah, Ketentuan Umum Retribusi Daerah, Kinerja Pungutan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal.

BAB V. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan metode analisis untuk memperoleh jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

BAB VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Analisis Data, Penerimaan PAD dan Retribusi Terminal, Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Upaya Pemungutan Retribusi, Efektifitas Retribusi Terminal dan Efisiensi Retribusi Terminal serta Analisis Perkiraan Penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul di masa yang akan datang.

BAB VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan implikasi kebijakan yang disarankan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.1 Struktur dan Karakteristik Fisik Dasar

2.2.1 Letak Geografis Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari 4 kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 18 kecamatan yaitu ; Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin. Kabupaten Gunungkidul terletak disebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibu Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) yang tepatnya ada di antara $110^{\circ}21-110^{\circ}50$ Bujur Timur dan $7^{\circ}46-8^{\circ}09$ Lintang Selatan, sedangkan tingginya bervariasi antara 0 meter sampai 700 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Gunungkidul beribukota di Wonosari. Jarak kota Wonosari menuju Yogyakarta (Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta) ± 39 km atau sekitar 1jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum, sedangkan secara administratif Kabupaten Gunungkidul berbatasan dengan beberapa kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di Jawa Tengah. Batas-batas wilayah Kabupaten Gunungkidul secara administratif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Batas Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Sebelah/Bagian	Perbatasan
1. Utara	Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo (Propinsi Jawa Tengah).
2. Timur	Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah).
3. Selatan	Samudra Indonesia.
4. Barat	Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman (Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul 2003

2.1.2 Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah 1.485,36 Km², secara administrasi terbagi menjadi 18 Kecamatan, dan 144 Desa/Kelurahan. Kecamatan yang merupakan kecamatan terluas adalah Kecamatan Semanu dengan luas 108,39 Km² yaitu 7,30% dari Wilayah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Ngawen dengan luas 46,59 Km² yaitu 3,14% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul. Keseluruhan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul
Dirinci Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase Luas
Panggung	99,80	6,72
Purwosari	71,76	4,83
Paliyan	58,07	3,91
Saptosari	87,83	5,91
Tepus	104,91	7,06
Tanjungsari	71,63	4,82
Rongkop	83,46	5,62
Girisubo	94,57	6,37
Semanu	108,39	7,30
Ponjong	104,49	7,03
Karangmojo	80,12	5,39
Wonosari	75,51	5,08
Playen	105,26	7,09
Patuk	72,04	4,85
Gedangsari	68,14	4,59
Nglipar	73,87	4,97
Ngawen	46,59	3,14
Semin	78,92	5,31
Jumlah	1.485,36	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul tahun 2003

2.2 Keadaan Sosial Kependudukan

2.2.1 Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hasil registrasi pertengahan tahun 2003 berjumlah 753.008 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan

dan 144 desa, dengan jumlah terbanyak yaitu Kecamatan Wonosari dengan 78.464 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada akhir tahun 2003 telah mencapai 754.047 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul
Tahun 1999-2003

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
1999	739.259	0,40
2000	743.282	0,54
2001	746.451	0,42
2002	749.875	0,45
2003	753.008	0,42

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul 2003

Dari data pada table 2.3, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunungkidul yang paling tinggi adalah pada tahun 2000 dengan persentase pertumbuhan 0,54% dan jumlah penduduk keseluruhan pada tahun tersebut sebesar 743.282 jiwa, sedangkan pertumbuhan yang paling kecil adalah pada tahun 1999 dengan persentase 0,40% dan jumlah penduduknya sebesar 739.259 jiwa.

2.2.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil registasi penduduk Kabupaten Gunungkidul pada pertengahan tahun 2003 tercatat sebanyak 753.008 jiwa yang terdiri dari 368.760 jiwa penduduk laki-laki dan 384.248 jiwa penduduk perempuan, dengan jumlah keluarga sebesar 155.629 keluarga. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di

Kecamatan Wonosari, yaitu sebanyak 78.464 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terendah terdapat di Kecamatan Purwosari yakni sebanyak 21.988 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk per keluarga di Kabupaten Gunungkidul adalah 4,84 dan ini berarti setiap keluarga di Kabupaten Gunungkidul diasumsikan dihuni oleh hampir 5 jiwa. Kecamatan Gedangsari merupakan kecamatan yang rata-rata penduduk per keluarganya terbesar, yaitu 5,39 sedangkan Kecamatan Karangmojo merupakan kecamatan yang rata-rata jumlah penduduk per keluarganya terendah, yaitu sebesar 4,30.

Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah sebesar 1.485,36 km² pada pertengahan tahun 2003 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 753.008 jiwa yang menyebar di 18 kecamatan. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul pada akhir tahun 2003 sebanyak 507 jiwa per km² dengan daerah terpadat adalah di Kecamatan Wonosari dengan kepadatan 1.039 jiwa per km² sedangkan wilayah kecamatan yang kepadatan penduduknya sedikit adalah Kecamatan Panggang yaitu dengan kepadatan 282 jiwa per km².

Daerah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 144 desa/kelurahan yang tersebar di setiap kecamatan. Kecamatan Wonosari yang merupakan kecamatan terpadat, juga memiliki jumlah desa/ kelurahan paling banyak yaitu sebanyak 14 desa, sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah desa/kelurahan paling sedikit ada 4 kecamatan yaitu antara lain ; Kecamatan Purwosari, Tepus,

Tanjungsari, dan Semanu. Secara lengkap data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Banyaknya Desa/Kelurahan
Per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jumlah Desa
Panggang	28.176	282	6
Purwosari	21.988	306	5
Paliyan	31.657	545	6
Saptosari	36.901	420	7
Tepus	38.750	369	5
Tanjungsari	28.235	394	5
Rongkop	32.318	387	8
Girisubo	27.852	295	8
Semanu	58.232	537	5
Ponjong	56.331	539	11
Karangmojo	56.597	706	9
Wonosari	78.464	1.039	14
Playen	59.896	569	13
Patuk	31.569	438	11
Gedangsari	40.221	590	7
Nglipar	35.048	474	7
Ngawen	35.867	770	6
Semin	54.906	696	10
Jumlah	753.008	507	144

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

2.3 Keadaan Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Gunungkidul terbentuk dari sektor-sektor yang saling mendukung satu sama lain. Indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di dalam suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator itu, mampu memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas yang terjadi dalam suatu periode tertentu dapat menghasilkan pendapatan tambahan kepada masyarakat suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada periode tertentu lebih besar dari periode sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan perekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. PDRB digunakan sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah penggunaan angka-angka PDRB atas dasar harga konstan yang dimaksudkan agar pengaruh perubahan harga dalam pendapatan atas dasar harga berlaku telah dihilangkan. Selain itu, ada atau tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan ditunjukkan dengan angka pertumbuhan pendapatan dengan atas dasar harga konstan.

Kondisi umum perekonomian Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik

ditandai dengan PDRB yang selalu meningkat tiap tahun. Kegiatan perekonomian Kabupaten Gunungkidul tidak hanya terkonsentrasi pada sektor yang dominan saja. Meski pada kenyataannya sektor pertanian merupakan sektor yang memberi sumbangan terbesar dan dominan dalam PDRB Kabupaten Gunungkidul, namun setiap sektor tetap memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

Perkembangan PDRB Kabupaten Gunungkidul tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dengan atas dasar harga konstan tahun 1993 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Kabupaten Gunungkidul
Tahun 1999-2003 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian	339.960	347.344	349.410	349.358	350.452
Pertambangan dan Galian	16.595	16.839	17.470	17.175	17.836
Industri Pengolahan	108.140	111.341	112.178	110.602	121.180
Listrik, Gas& Air Bersih	1.112	2.160	2.253	2.390	2.662
Bangunan	74.584	75.096	75.433	75.824	76.343
Perdagangan,hotel& Restoran	96.627	99.350	102.508	107.824	110.399
Angkutan & Komunikasi	91.997	94.478	94.820	95.678	99.383
Keuangan,Persewaan & jasa Perusahaan	35.331	40.219	41.621	42.620	43.307
Jasa-Jasa	140.276	143.669	155.194	158.897	167.455
Jumlah	905.619	930.496	950.887	968.908	989.017

Sumber :BPS Kabupaten Gunungkidul 2003

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2003 sebesar 989.017 juta rupiah atau naik sekitar 20.109 juta rupiah dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2002. Sektor pertanian tetap menjadi sektor yang dominan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 16,9% dari PDRB Kabupaten Gunungkidul. Sektor lain yang cukup besar kontribusinya adalah sektor industri pengolahan mengingat Kabupaten Gunungkidul yang hanya terdapat industri non migas yang dalam pengelolaannya dikelompokkan menjadi industri Besar Sedang, Industri Kecil dan Rumah Tangga. Sedangkan berikutnya sektor-sektor yang mempunyai kontribusi diurutkan sesuai besar kontribusinya adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Bangunan, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Pertambangan dan Galian dan yang terakhir adalah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

2.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun anggaran 1999 sebesar Rp. 86.717.911.346,33 ,tahun anggaran 2000 sebesar Rp. 98.466.865.940,79, tahun anggaran 2001 sebesar Rp. 172.790.002.450,00, pada tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 251.665.063.589,41, sedangkan pada tahun 2003 sebesar Rp.

303.666.803.693,00. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya mengalami kenaikan pendapatan untuk belanja daerah, sehingga pembangunan ekonomi masyarakat dan prasarana publik lebih meningkat.

2.3.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul

Untuk mengetahui sumber-sumber PAD yang dimiliki daerahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu mengenal lebih dekat lagi tentang struktur PAD yang dimiliki, sehingga dapat pula mengetahui sumber PAD yang berpotensi dan kurang potensial. Dengan mengetahui sumber-sumber yang potensial maupun tidak potensial, Pemda diharapkan dapat menitikberatkan perhatiannya pada sumber PAD yang potensial dan berupaya menggali agar lebih optimal, sedangkan untuk sumber PAD yang kurang potensial, Pemda perlu melakukan koreksi dan mengkaji lebih dalam tentang sebab dan kendala yang menyebabkan sumber itu kurang potensial. Dengan demikian Pemda bisa mencari pemecahan masalah untuk lebih meningkatkan potensi-potensi daerah.

Penerimaan dari Retribusi Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul mendominasi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Selama periode tahun 1994 sampai dengan 2003, PAD cenderung mengalami peningkatan, meskipun dilihat dari pertumbuhannya pada tahun 1998 dan 2000 mengalami penurunan namun di tahun berikutnya menampakkan kenaikannya kembali. Penurunan pertumbuhan penerimaan PAD pada tahun 1998, disebabkan

oleh krisis moneter yang puncaknya terjadi pada tahun tersebut, dan berdampak pada perekonomian daerah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan penurunan pertumbuhan PAD yang terjadi pada tahun 2000, seperti daerah-daerah lainnya disebabkan oleh perubahan perhitungan tahun yaitu tahun fiskal menjadi tahun kalender. Akibat dari perubahan tersebut, jumlah perhitungan bulan pada tahun anggaran 2000 adalah sembilan bulan sedangkan tahun anggaran yang lainnya menggunakan perhitungan yang jumlahnya 12 bulan.

Besarnya pertumbuhan penerimaan PAD dari tahun 1994 sampai dengan 2003 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Pertumbuhan PAD Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 1994-2003

Tahun Anggaran	Penerimaan PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
1994	1.888.178.000,00	-
1995	2.622.789.008,51	38,90
1996	2.956.810.613,55	12,73
1997	3.578.070.997,12	21,01
1998	4.074.414.903,99	13,87
1999	5.409.513.658,49	32,76
2000	5.719.379.104,90	5,72
2001	7.488.588.450,00	30,93
2002	13.486.859.839,85	80,09
2003	14.344.042.219,00	6,35

Sumber : BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

2.3.3 Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul

Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.7

Pertumbuhan Retribusi Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 1994-2003

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
1994	1.471.840.000,00	-
1995	1.721.118.926,00	16,93
1996	1.877.379.550,00	9,07
1997	2.357.402.754,90	25,56
1998	2.828.549.190,00	19,98
1999	3.571.247.169,00	26,25
2000	4.245.123.100,00	18,86
2001	6.375.894.278,50	50,19
2002	9.009.394.578,75	41,30
2003	9.906.187.522,00	9,95

Sumber : BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

Fluktuasi yang terjadi dalam pertumbuhan retribusi daerah dilatar belakangi oleh berbagai macam sebab. Penurunan pertumbuhan retribusi daerah pada tahun 1998 tentu saja disebabkan oleh dampak krisis moneter yang melanda Negara ini, sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 2000 dikarenakan perubahan perhitungan fiskal menjadi perhitungan kalender. Penurunan pertumbuhan yang terjadi terus menerus pada 3 tahun terakhir, kurang lebih disebabkan oleh berbagai macam masalah yaitu kemarau dengan pergantian musim yang tidak menentu menyebabkan hasil pertanian menurun sehingga penduduk Kabupaten Gunungkidul yang didominasi oleh petani mengalami penurunan pendapatan dan secara umum mempengaruhi pendapatan perkapita.

2.3.4 Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul

Retribusi Terminal merupakan kegiatan dari Retribusi Daerah yang juga merupakan PAD di Kabupaten Gunungkidul. Panerimaan Retribusi Terminal diperoleh dari pemungutan retribusi angkutan umum yang masuk terminal yaitu, AKAP, AKADP, Angkudes dan Angkot. Selain pungutan yang masuk terminal, penerimaan Retribusi Terminal juga diperoleh dari fasilitas-fasilitas yang disediakan di dalam lingkungan terminal. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Pertumbuhan Retribusi Terminal
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 1994-2003

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Terminal (Rp)	Pertumbuhan (%)
1994	68.081.900	-
1995	47.181.300	-30,69
1996	50.961.600	8,01
1997	54.681.000	7,29
1998	53.891.300	-1,44
1999	55.266.000	2,55
2000	45.091.600	-18,40
2001	66.415.100	47,28
2002	74.626.400	12,36
2003	91.949.500	23,21

Sumber : BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

Dari tabel tersebut, dapat dilihat pertumbuhan Retribusi Terminal pada sepuluh tahun terakhir dari tahun anggaran 1994 sampai dengan tahun anggaran 2003, penerimaan Retribusi Terminal cukup mengalami fluktuasi yang berarti seiring dengan pertumbuhannya yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Pada tahun anggaran 1995 pertumbuhan Retribusi Terminal mengalami penurunan sebesar 30,69% dan mulai mengalami kenaikan yang cukup berarti pula pada tahun 1996 yaitu sebesar 8,01%, kemudian seiring dengan proses menuju krisis moneter yang melanda Negara Indonesia, tentu saja membawa dampak pada pertumbuhan Retribusi Terminal. Pada tahun 1997 kenaikan hanya 7,29% dan pada tahun 1998 yang merupakan puncak dari krisis moneter, pertumbuhan Retribusi Terminal mengalami penurunan sebesar 1,44%. Pada tahun 1999, pertumbuhan mulai mengalami kenaikan sebesar 2,55%, namun pada tahun 2000 menurun sebesar 18,40% yang disebabkan oleh perubahan perhitungan tahun fiskal menjadi perhitungan tahun kalender. Sedangkan pada tahun 2001, pertumbuhan Retribusi Terminal justru mengalami kenaikan yang berarti yaitu sebesar 47,28%. Pada tahun 2002 kenaikan pertumbuhan Retribusi Terminal sebesar 12,36% dan pada tahun 2003 kenaikan pertumbuhan Retribusi Terminal sebesar 23,21%.

2.4 Badan Keuangan Daerah

Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengalami transformasi kelembagaan dalam pemerintahannya. Di era Otonomi Daerah ini, Pemerintah daerah mengalami transformasi pada lembaga/ badan penerimaan keuangan daerah, yang sebelumnya penerimaan daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA). Sesuai dengan Keputusan Bupati

Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul, sekarang di Kabupaten Gunungkidul, penerimaan keuangan daerah dikelola oleh Badan Keuangan daerah (BKD).

2.4.1 Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Dalam ketentuan umum Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03 tahun 2001, telah dijelaskan bahwa dalam Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul,

- Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Sekretaris adalah Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi.
- Kas daerah adalah Aparat/Lembaga Keuangan Daerah yang melaksanakan pekerjaan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan Daerah.

Tugas Badan Keuangan Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan, dan Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Fungsi Badan Keuangan Daerah menurut Keputusan Kepala Daerah Nomor 03 tahun 2003, antara lain :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan
- c. Penyiapan bahan perencanaan umum di bidang keuangan
- d. Penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan teknis di bidang keuangan
- e. Pengelolaan dan pemungutan pendapatan Daerah
- f. Penyiapan bahan penerimaan dana perimbangan
- g. Penyelenggaraan verifikasi keuangan
- h. Penyelenggaraan perbendaharaan pendapatan dan belanja
- i. Penyiapan bahan koordinasi penepatan target pendapatan
- j. Pelaksanaan pembinaan teknis pendapatan Daerah
- k. Penyiapan bahan pengembangan pendapatan Daerah
- l. Pengelolaan ketatausahaan Badan

Dalam pelaksanaan kegiatannya, organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Bagian
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian-

sub bagian

- c. Unsur Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari Sub
Bidang-sub bidang

- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan dan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang disebut Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Badan, pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pengelolaan tata usaha kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- c. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mengelola surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan perjalanan dinas serta melaksanakan tugas yang lain diberikan oleh Sekretaris.

Dalam organisasi, Badan Keuangan Daerah terdiri dari beberapa bidang yaitu antara lain :

- Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengembangan Pendapatan, yang terdiri dari Sub Bidang Pendataan, Sub Bidang Penetapan dan Sub Bidang Pengembangan.
- Bidang Penerimaan, yang terdiri dari Sub Bidang Pajak, Sub Bidang Retribusi dan Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
- Bidang Verifikasi, yang terdiri dari Sub Bidang Verifikasi Pendapatan, Sub Verifikasi Belanja.
- Bidang Perbendaharaan, yang terdiri dari Sub Bidang Belanja Pegawai, Sub Bidang Belanja Non Pegawai dan Sub Bidang perbendaharaan Pendapatan.

Sub Bidang Retribusi merupakan sub bidang dari Bidang Penerimaan dalam Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Menurut Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03 tahun 2001, Sub Bidang Retribusi mempunyai beberapa tugas yaitu :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan menyiapkan bahan pengelolaan pungutan retribusi.
- b. Mencatat dan mendistribusikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen lainnya kepada Wajib Retribusi.
- c. Melakukan pungutan retribusi kepada Wajib Retribusi yang tidak menyetorkan sendiri atau secara teknis tidak dimungkinkan menyetorkan sendiri kewajiban retribusinya ke tempat pembayaran.
- d. Mengadministrasikan dan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).
- e. Melakukan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi yang telah melewati jatuh tempo pembayarannya sesuai prosedur yang ditentukan.
- f. Mengadministrasikan dan menyetorkan hasil penagihan Retribusi ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).
- g. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang retribusi.
- h. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Wajib Pungut.
- i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerimaan.

2.4.2 Kewenangan Pengurusan Pendapatan daerah

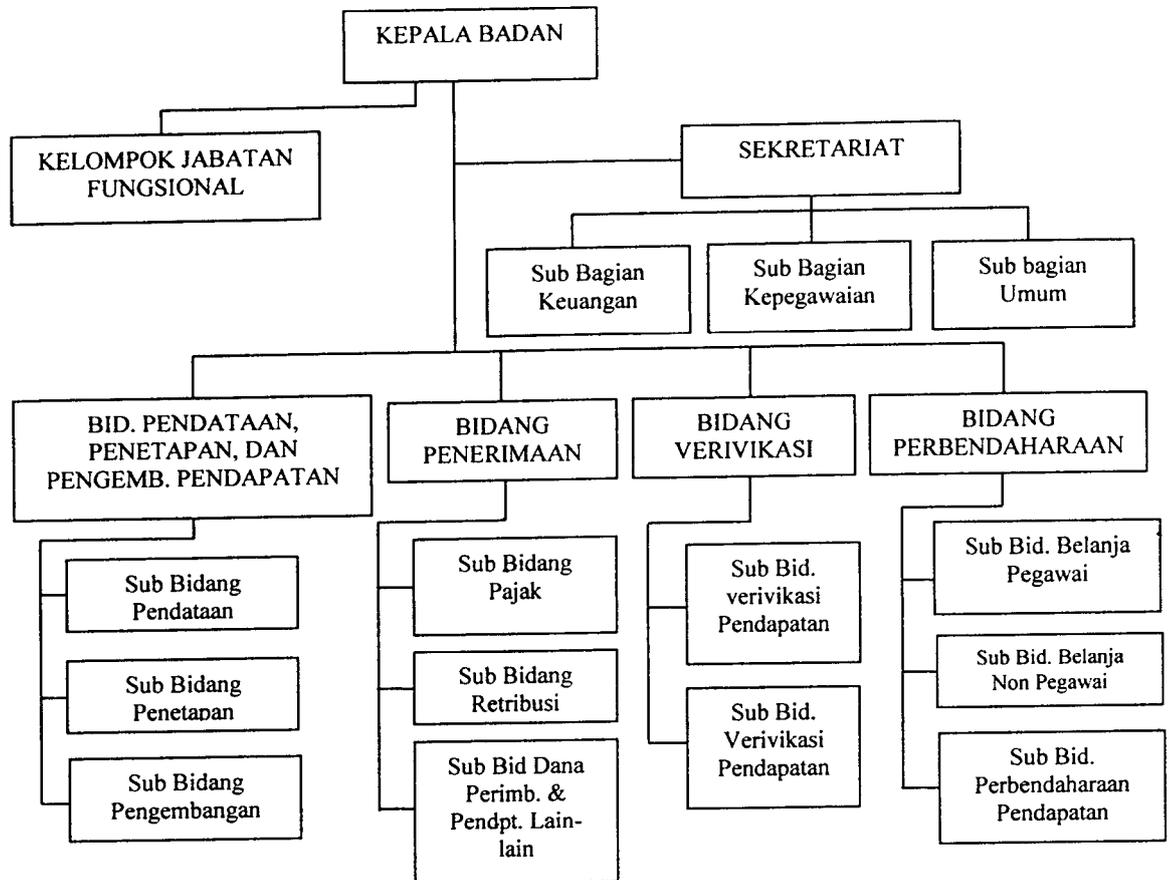
Sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyelenggarakan pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Daerah menjaga agar segala peraturan dan lain-lain serta segala piutang daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.

Kewenangan otorisator di bidang pendapatan daerah pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi kewenangan otorisator berupa penetapan/peninjauan, perubahan peraturan daerah, termasuk perubahan tarif yang menimbulkan hak tagihan pada Pemerintah Daerah.

Kewenangan otorisator ini adalah melakukan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan RAPEDA, baik baru, perubahan atau pencabutan peraturan daerah.
2. Penetapan PERDA di bidang Pendapatan Daerah.
3. Penetapan keputusan pelaksanaan PERDA oleh Kepala Daerah.

Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

**Bagan Struktur Organisasi
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul**

2.5 Sistem Jaringan Jalan dan Jasa Transportasi

2.5.1 Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Gunungkidul, menyesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan jaringan trayek yang tersebar di seluruh Kabupaten Gunungkidul. Sumbu utama yang mendominasi jaringan jalan adalah jalur Wonosari-Yogyakarta. Sejak dioperasikan jalan lingkar (*Ringroad*), transportasi di Kabupaten Gunungkidul khususnya di Kota Wonosari terkesan menjadi teratur. Tata keruangan kota yang memberlakukan peraturan jalur baru di Kota Wonosari, menjadikan keteraturan pengguna jalan di dalam kota. Rute untuk mencapai Terminal Wonosari dari seluruh kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, memfungsikan adanya jalur lingkar (*Ringroad*) sebagai jalur trayek menuju terminal.

Perkembangan wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam mobilitasnya didukung pula dengan adanya jaringan jalan Kabupaten Gunungkidul yang berhubungan dengan kabupaten lain yaitu, Wonogiri, Klaten dan Bantul.

Tingkat pertumbuhan panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 1999 panjang jalan Kabupaten Gunungkidul adalah sepanjang 1.171,36 Km, tahun 2000 sepanjang 1.191,03 Km, tahun 2001 sepanjang 841,46 Km, tahun 2002 sepanjang 840,66 Km dan pada tahun 2003 tetap sama yaitu sepanjang 840,66 Km.

Panjang jalan Kabupaten Gunungkidul menurut permukaan dan kondisinya tahun 2003 adalah sepanjang 840,66 Km. panjang jalan menurut jenis permukaan bisa di klasifikasikan yaitu, jalan beraspal sepanjang 467,43 Km, yang berkerikil MDK sepanjang 359,43 Km, berupa tanah sepanjang 13,80 Km atau dalam persentase, beraspal sebesar 55,6%, kerikil MDK 42,72% dan yang berupa tanah sebesar 1,64%. Bila dilihat dari kondisi jalan, jalan di Kabupaten Gunungkidul yang dalam keadaan baik sepanjang 503,29 Km atau sebesar 59,86%, dalam keadaan sedang sepanjang 133,74 Km atau sebesar 15,90%, keadaan rusak sepanjang 185,93 Km atau 22,11% sedangkan yang dalam keadaan rusak berat sepanjang 17,70 Km atau sekitar 2,10%.

Panjang jalan menurut statusnya, di Kabupaten Gunungkidul tahun 2003 dapat dirinci sebagai berikut :

- Jalan Negara : 54,88 Km
- Jalan Propinsi : 251,10 Km
- Jalan Kabupaten : 840,66 Km
- Jalan Desa : -

Dari data tersebut, dapat mempengaruhi panjang jalan sesuai kondisi dan jenis permukaan. Semakin banyak jalan yang statusnya lebih tinggi, maka kualitas kondisi dan jenis permukaannya lebih baik. Dengan semakin baiknya kondisi jalan tersebut, maka memacu pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten

Gunungkidul yang terbukti dengan banyaknya permintaan konsumen terhadap kendaraan bermotor.

2.5.2 Jasa Transportasi

Untuk mencapai Kota Wonosari, terdapat jalur-jalur yang merupakan jalur menuju Terminal Wonosari dari seluruh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul. Mengingat dan menurut undang-undang yang menetapkan adanya sub terminal belum ada, di Kabupaten Gunungkidul hanya terdapat beberapa pelataran parkir yang bisa ditemui diantaranya adalah di Kecamatan Semin, Baran, Semanu, dan Kecamatan Panggang.

Dalam aktivitas mobilitas Kabupaten Gunungkidul dilayani oleh angkutan-angkutan yaitu :

- Bus AKAP (Angkutan Kota Antar Propinsi)
- Bus AKDP (Angkutan Kota Dalam Propinsi)
- Angkudes (Angkutan Pedesaan)
- Angkot (Angkutan kota)

Selain angkutan-angkutan tersebut, terdapat angkutan yang lain yaitu becak yang khususnya di Kota Wonosari dan ojek. Angkutan Bus AKAP melayani jalur antar propinsi seperti Wonosari-Yogyakarta-Wonosari. Angkutan Pedesaan melayani jalur dari seluruh kecamatan menuju Terminal Wonosari dan angkot melayani jalur dalam Kota Wonosari.

Dalam pelayanan Angkudes, di Kabupaten Gunungkidul mengusahakan pelayanan yang optimal yaitu jalur dari kecamatan menuju ibukota Kabupaten Gunungkidul yaitu Wonosari. Jaringan transportasi di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Transportasi
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

Rute	Jarak (Km)	Waktu (menit)
I. Angkutan Luar Kabupaten		
Jogja-Wonosari	40	55
II. Angkutan Dalam Kabupaten		
1. Wonosari-Panggang	38	50
2. Wonosari-Paliyan	15	25
3. Wonosari-Saptosari	19	30
4. Wonosari-Tepus	17	30
5. Wonosari-Rongkop	26	30
6. Wonosari-Semanu	7	10
7. Wonosari-Ponjong	15	20
8. Wonosari-Karangmojo	9	10
9. Wonosari-Playen	7	10
10. Wonosari-Patuk	21	20
11. Wonosari-Gedangsari	23	45
12. Wonosari-Nglipar	11	15
13. Wonosari-Ngawen	30	30
14. Wonosari-Semin	23	25
15. Wonosari-Girisubo	40	55
16. Wonosari-Tanjungsari	14	20
17. Wonosari-Purwosari	45	60

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

2.6 Dinas Perhubungan

Sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Dinas-dinas Daerah, disebutkan bahwa Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan pelaksana tugas-tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas perhubungan memiliki tugas, fungsi dan organisasi yaitu sebagai berikut :

A. Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 15 tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di bidang perhubungan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

B. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

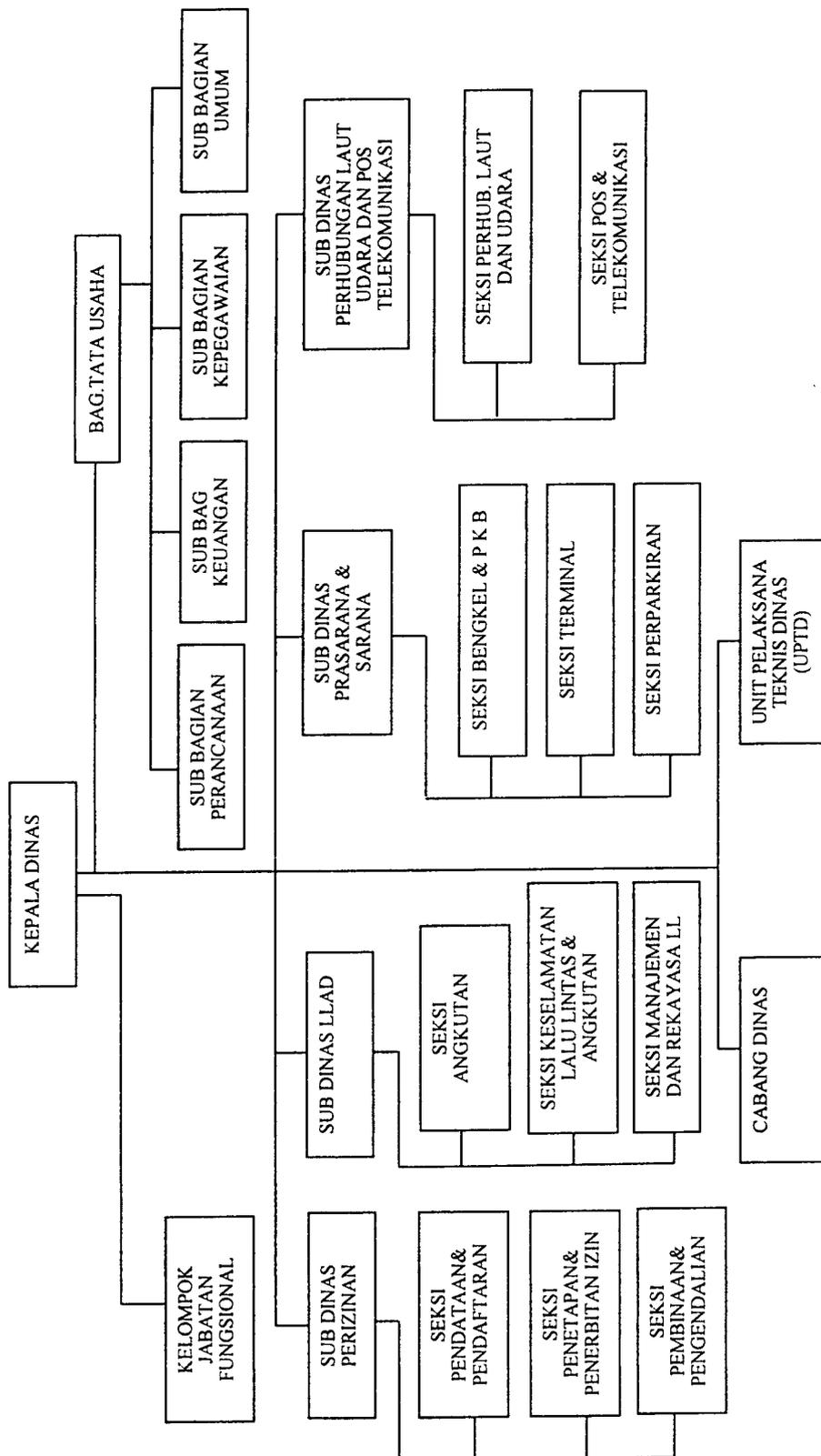
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perhubungan
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
3. Penyiapan bahan perencanaan umum di bidang perhubungan

4. Penyiapan bahan perencanaan umum kebijakan teknis di bidang perhubungan
5. Pelaksanaan bimbingan di bidang perhubungan
6. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang pertumbuhan darat, laut, udara dan pos telekomunikasi.
7. Pelayanan perizinan di bidang perhubungan
8. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat, laut, udara dan pos telekomunikasi
9. Pengelolaan prasarana dan sarana perhubungan
10. Pengelolaan ketatausahaan dinas

C. Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, dapat dirinci sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan : Kepala dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha terdiri dari sub bagian-sub bagian
3. Unsur Pelaksana : Sub Dinas-Sub dinas terdiri dari seksi-seksi
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan uraian tugas, fungsi dan organisasi, maka dapat digambarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :



Gambar 2.2
 Bagan Struktur Organisasi
 Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

BAB III

TELAAH PUSTAKA

Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, yang sejenis maupun berbeda pokok permasalahan yang dibahasakan maka telaah pustaka yang dijadikan pertimbangan penelitian ini antara lain :

1. Penelitian (skripsi) karya Ahmad Sunardi (2003), dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retribusi Terminal di Kota Magelang*". Dimana peneliti tersebut mencoba menganalisis apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi terminal Kabupaten Magelang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi terminal adalah jumlah bus umum dan PDRB. Selain itu. Juga menganalisis tentang potensi, efisiensi, dan efektifitas retribusi terminal. Hasil analisisnya dapat disimpulkan antara lain :
 - a. Komponen Retribusi Daerah maupun PAD merupakan komponen setelah pos penerimaan dinas-dinas untuk menandai pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang.
 - b. Penurunan retribusi terminal terhadap PAD maupun retribusi daerah yang terjadi disebabkan karena berkurangnya penerimaan retribusi terminal yang cukup banyak akibat krisis ekonomi dan tidak berlakunya pungutan retribusi peron.

- c. Penerimaan belum optimal dipungut berdasarkan potensi yang ada.
 - d. Pemungutan retribusi terminal sudah semakin efisien namun belum cukup efektif.
 - e. Penerimaan retribusi terminal dipengaruhi secara erat dan signifikan positif oleh variabel independen.
2. Penelitian (skripsi) karya Wahyu Dwisaputra (2002), dengan judul *“Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah”* (suatu penelitian di Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Dari analisisnya peneliti tersebut menyimpulkan bahwa, besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul tiap tahun selalu meningkat yang merupakan kontribusi PAD terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Namun, besarnya PAD yang dikontribusikan guna Otonomi Daerah masih kecil dan menyebabkan Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan Otonomi Daerahnya belum dapat mencapai apa yang diharapkan atau dengan kata lain masih jauh dari Otonomi yang mandiri.
3. Penelitian (skripsi) karya Nugroho Afrianto (2002), dengan judul *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”*

Kabupaten Dati II Klaten Tahun Anggaran 1983/1984 – 1999/2000". Dari analisis itu dapat dihasilkan kesimpulan bahwa, :

- a. Pada sektor pariwisata Kabupaten Klaten belum memberikan sumbangan yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten. Hal itu terjadi karena ada beberapa obyek wisata yang mampu menyerap pengunjung yang cukup besar tetapi tidak dipungut bea masuk (retribusi) sebagai sumber pemasukan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, dan juga terdapat beberapa wajib retribusi yang tidak memperpanjang ijin usahanya yang sudah habis atau tidak melakukan pendaftaran kembali.
 - b. Di Kabupaten Klaten keberadaan industri besar dan sedang belum memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.
4. Penelitian (Skripsi) karya Fitriyah Nurlaili (2004), dengan judul "*Peran Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang*". Dalam analisisnya, penulis menyimpulkan menjadi beberapa kesimpulan yaitu :
- a. Besar kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Jombang dirasa belum cukup maksimal. Kontribusi pasar pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 mengalami fluktuasi tetapi dua tahun terakhir mengalami

penurunan yang cukup berarti. Rata-rata kontribusi retribusi pasar terhadap PAD sebesar 4,57%.

- b. Elastisitas retribusi pasar di Kabupaten Jombang terhadap PDRB tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 berfluktuasi. Rata-rata elastisitasnya yaitu sebesar 8,75%.
- c. Potensi retribusi pasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
- d. Perhitungan tingkat upaya pemungutan terlihat tiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata tiap tahunnya sebesar 0,08%.
- e. Efektifitas retribusi pasar terlihat berfluktuasi, meski sebagian besar mengalami penurunan. Efektifitas retribusi pasar di Kabupaten Jombang rata-rata tiap tahunnya sebesar 106,78% dan semuanya digolongkan kinerja yang efektifitasnya sangat efektif.
- f. Berdasarkan perhitungan efisiensi retribusi pasar di Kabupaten Jombang terlihat cukup efisien pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 efisiensinya tidak mengalami kenaikan yaitu tetap sebesar 2,99% dan digolongkan dalam tingkat yang efisien. Dan berarti bahwa hanya 2,99% yang dikeluarkan sebagai biaya pemungutan dari total realisasi penerimaan retribusi pasar tersebut.

BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah memiliki peranan yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di daerah, utamanya guna mewujudkan Otonomi Daerah (OTDA) yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan OTDA tersebut, sesuai dengan pengertian mengurus dan mengatur rumah tangganya, sumber dana yang berasal dari pendapatan daerah, merupakan tiang penyangga keberhasilan pembangunan.

Sebagaimana makna dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dari berbagai aspek.

Pendapatan daerah merupakan bagian dari penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang disusun secara periodik dan berulang kembali. Pendapatan Daerah dalam pengertian yang lain lebih dimaksudkan pada penyelenggaraan penghimpunan sumber pendapatan, baik dilihat dari sistem

pemungutan maupun tata laksana pemungutannya serta kegiatan lain yang mendukung kegiatan penghimpunan dimaksud. Upaya penghimpunan sumber dana tersebut lebih ditekankan pada Pandapatan Asli Daerah guna mendukung terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab. Dasar hukum atau landasan hukum yang bersifat umum mengenai Pedapatan daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23 Ayat (2).
- b. Garis-garis Besar haluan Negara (GBHN).
- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- f. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah.
 - b. Hasil Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, yaitu :
 - a. Dana Bagi Hasil yaitu, dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan serta penerimaan dari sumber daya alam.
 - b. Dana alokasi umum.
 - c. Dana alokasi khusus.
3. Pinjaman Daerah, yaitu :
 - a. Pemerintah.
 - b. Pemerintah Daerah Lain.
 - c. Lembaga Keuangan Bank.
 - d. Lembaga Keuangan Bukan Bank.
 - e. Masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Antara lain : hibah dan pendapatan dana darurat.

Dengan demikian pendapatan daerah, diperoleh daerah sebagai hasil dari :

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri.
2. Pendapatan Berasal Dari Pemerintah.
3. Lain-lain pendapatan yang sah, yang digunakan untuk membiayai pengaturan dan pengurusan daerah setempat.

4.2. Retribusi Daerah

4.2.1 Definisi Retribusi dan Retribusi Daerah

Ada beberapa pengertian tentang retribusi yang penulis gunakan sebagai referensi, antara lain :

1. Pengertian umum retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan yang berlaku (*BKD Kabupaten Gunungkidul, 2000*).
2. Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara” (*Rochmad Sumitro, 1979: 17*).
3. Retribusi merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis

karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu (*S.Munawir, 1980: 4*).

Disamping itu, ada beberapa pengertian tentang Retribusi Daerah yang penulis gunakan juga sebagai referensi, yaitu :

1. Secara umum Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (*BKD Kabupaten Gunungkidul 2000*).
2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung (*The Liang Gie, 1968: 78*).
3. Retribusi Daerah adalah pungutan pendapatan oleh Pemerintah sebagai penganti (kerugian) dienssten yang diberikan oleh Daerah kepada siapa saja yang membutuhkan dienssten itu (*Pasal 37 UU Nomor 22 tahun 1948*).

Dari penertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.

4.2.2 Sifat Retribusi Daerah

Berdasar pada Intensifikasi Pendapatan Daerah dan Desa yang disusun oleh BKD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Gunungkidul, ada beberapa sifat Pendapatan Daerah dari pos Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Paksaannya bersifat ekonomis.
- b. Ada imbalan langsung ataupun tidak langsung kepada pembayaran retribusi daerah.
- c. Walaupun memenuhi syarat materiil dan formil, tetapi tetap ada alternatif untuk berkewajiban/ mau tidak mau membayar.
- d. Merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgeter tidak menanjak.
- e. Dalam hal tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

4.3. Ketentuan Umum Retribusi Daerah

Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah yaitu meliputi :

1. *Retribusi Daerah* adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. *Wajib Retribusi* adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. *Badan* adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
4. *Jasa* adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. *Jasa Umum* adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. *Jasa Usaha* adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. *Perizinan Tertentu* adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

8. *Masa Retribusi* adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. *Pembukuan* adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi.
10. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
11. *Penyidikan tindak pidana* dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil.

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, juga berpedoman pada KEPMENDAGRI Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis Retribusi Dearah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - f. Retribusi Air Bersih.
 - g. Retribusi Pelayanan Pasar.
 - h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - k. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
 - c. Retribusi Terminal.
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 - f. Retribusi Penyedotan Kakus.
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - h. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - j. Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
- a. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
 - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- d. Retribusi Izin Gangguan.
- e. Retribusi Izin Trayek.
- f. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

Tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

4.4. Kinerja Pungutan Retribusi Daerah

Kinerja suatu daerah dapat pula diartikan sebagai kemampuan daerah dalam prestasi kerjanya. Dengan demikian, untuk menilai potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi yang selanjutnya disebut dengan Retribusi Daerah, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan dapat digunakan untuk menilai kecukupan, elastisitas, keadilan, tingkat tarif atas balas layanan, kesepakatan fasilitas serta kemampuan administrasi didaerah tersebut. Kriteria kinerja pungutan Retribusi Daerah (*Kesit Bambang Prakoso, 2003:53*) terdiri dari :

1. Penilaian : Kecukupan dan Elastisitas

Beberapa ketentuan terhadap retribusi bahwa elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, umumnya dipengaruhi oleh permintaan atau konsumsi terhadap pelayanan di dalam suatu pertumbuhan. Tetapi responnya juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memperluas pelayanan guna memenuhi pertumbuhan penduduk, khususnya di sektor-sektor besar di perkotaan, yang sering dikaitkan dengan penurunan skala ekonomi. Retribusi-retribusi cenderung tidak responsif kepada inflasi, namun hampir selalu didasarkan pada tarif per unit pelayanan yang tetap dan suatu wewenang mengambil keputusan untuk meningkatkan apabila terjadi biaya-biaya naik.

2. Penilaian : Keadilan

Retribusi adalah regresif secara tradisional. Ada tiga alasan utama yaitu, pertama, penilaian yang jatuh pada konsumsi, yang mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dasar daripada tingkat pendapatan. Kedua, subsidi sering lebih menguntungkan masyarakat yang berpendapatan menengah keatas dibandingkan dengan masyarakat miskin. Ketiga, karena biaya modal tidak disesuaikan dengan memperhatikan tingkat konsumsi dan benar-benar tidak berbeda menurut tingkatnya tersebut, banyak tarif didasarkan kepada suatu penurunan biaya unit.

3. Penilaian : Kemampuan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Ada beberapa masalah dan prosedur dalam praktek pemungutan retribusi yaitu, dalam praktek terdapat masalah teknis, kedua adalah masalah yang menyangkut keinginan politik untuk mengenakan sanksi, karena mencantumkan pembebanan sanksi adalah penting untuk mengefisienkan administrasi retribusi. Praktek mengefisienkan administrasi retribusi adalah memperkirakan pendapatan apa yang harus diterima dan kemudian menggunakan target penerimaan dari pemungut. Praktek yang kedua adalah mensubkontrakkan retribusi kepada pemungut-pemungut komersial yang menawarkan penerimaan bulat secara kompetitif. Praktek yang ketiga adalah meminta sekelompok lingkungan kecil untuk memungut retribusi dan membayarkannya bersama-sama kepada pihak pemberi pelayanan pelaksanaan retribusi daerah dan harus mempertimbangkan kemampuan administrasi daerah yang bersangkutan.

4. Penilaian : Kesepakatan Politis

Sebagian besar retribusi pada prinsipnya dapat diterima. Sepanjang mereka langsung dikaitkan kepada suatu pelayanan dan konsumsi tertentu

termasuk elemen pemilihan dimana retribusi dapat dimengerti dan sesuai dengan keinginan yang layak. Namun demikian, tingkat atau besarnya retribusi lebih sensitif secara politik. Sebagian besar retribusi harus dibayar dari pendapatan sendiri dan dianggap sebagai kebutuhan sehari-hari oleh sebagian masyarakat. Kemungkinan lain, peningkatan retribusi karena peningkatan biaya mungkin dapat mengakibatkan penurunan konsumsi dan selama biaya modal dapat konstan, maka akan meningkatkan biaya per unit. Hubungan langsung antara konsumsi dan retribusi tidak selalu merupakan suatu keuntungan politis.

5. Penilaian : Retribusi oleh Pemerintah Daerah

Sejauh ini, pembahasan belum difokuskan khususnya pada retribusi oleh Pemerintah Daerah, selama masih terdapat perbedaan yang kecilpun, dalam praktek dan pengalaman Pemerintah Pusat, BUMN dan Pemerintah Daerah. Banyak pelayanan yang bersifat pembayaran retribusi langsung yang sebenarnya disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kedekatan relatif antara badan-badan daerah dengan orang-orang yang berhak memilih akan menambah ketidakmauan mereka untuk menaikkan tarif.

Dari kriteria-kriteria tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan di dalam tingkat penyediaan, penerimaan relatif, kemudahan pemungutan dan kebutuhan untuk menguji atau mendisiplinkan konsumen utama seluruhnya merupakan alasan yang kuat untuk membebaskan biaya langsung pada konsumen.

Retribusi dapat dibentuk untuk tujuan-tujuan yang masih ada unsur keinginan politis dan tidak ada alternatif fiskal yang sesuai. Akan tetapi banyak retribusi yang bersifat sensitif yang tinggi antara lain, penerimaan lebih rendah dari tingkat yang dibutuhkan untuk pengoperasian pelayanan secara efektif, khususnya pada saat inflasi, karena politik enggan untuk meningkatkan tarif atau mengenakan sanksi. Hubungan antara konsumsi, biaya dan sifat langsung dari pembayaran akan mendorong keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan yang melibatkan lembaga-lembaga yang terkait, tetapi sensitifitas konsekuensinya dapat merusak kelangsungan hidup suatu pelayanan yang dapat dipungut retribusi.

Untuk menganalisis kinerja secara kuantitatif, dapat digunakan perhitungan-perhitungan dengan menganalisa data yang ada. Analisa kuantitatif yang dimaksud antara lain :

1. Kontribusi Retribusi

Fungsi perhitungan kontribusi retribusi adalah untuk mengetahui peran atau nilai tambah retribusi itu sendiri terhadap sesuatu yang menjadi ukuran dimana didalamnya terdapat retribusi tersebut. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran/kontribusi retribusi. Perhitungan kontribusi ini menggunakan perbandingan antara dua data yang saling berhubungan. Misalnya ; kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah, atau terhadap PAD, dan sebagainya. Penilaian kontribusi ini berdasarkan

perhitungan, semakin tinggi persentase kontribusi maka kinerjanya akan semakin baik pula. Nilai kontribusi disajikan dalam persen.

2. Tingkat Upaya Retribusi

Upaya pemungutan retribusi adalah suatu hasil sistem pemungutan retribusi dibanding dengan kemampuan membayar retribusi yang bersangkutan, disini timbul masalah bagaimana mengukur kemampuan bayar retribusi secara obyektif. Pengukuran yang lazim digunakan adalah PDRB, dengan anggaran pemerintah daerah yang mewakili wewenang mengenakan retribusi dan menetapkan tarif (*Fitriyah Nurlaili, 2004 : 37*).

3. Efektifitas Retribusi

Efektifitas adalah sebagai salah satu indikator kinerja bagi pelaku pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran/target. Efektifitas retribusi dihitung dengan berdasarkan data yang diperoleh dari konsumen perhitungan realisasi penerimaan retribusi. Ada beberapa tingkatan persentase efektifitas kinerja, yaitu (*Dudi Mi'raz Imaduddin, 2000 :17*) :

- a. Lebih dari 100% digolongkan sangat efektif.
- b. 90%-100% digolongkan efektif.
- c. 80%-90% digolongkan cukup efektif.
- d. 60%-80% digolongkan kurang efektif.
- e. Kurang dari 60% digolongkan tidak efektif.

Dalam pengukuran efektifitas, selain target penerimaan retribusi, potensi suatu daerah juga bisa digunakan untuk menghitung ukuran efektifitas kinerja pemungutan retribusi. Penulis menggunakan target penerimaan retribusi karena, disesuaikan dengan data yang ada dan terlengkap yang penulis dapat dari beberapa sumber data.

4. Efisiensi Retribusi

Efisiensi retribusi menggambarkan bagaimana efisiensi dari biaya pemungutan dan realisasi penerimaan retribusi. Hasil dari perhitungan ini diperoleh dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil penerimaan retribusi. Besarnya biaya yang dikeluarkan atau biaya pemungutan berdasarkan jumlah realisasi retribusi. Hasil yang semakin efisien apabila nilai yang diperoleh menunjukkan presentase yang semakin kecil dan sebaliknya apabila semakin besar berarti semakin tidak efisien. Presentase efisiensi kinerja dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu (*Dudi Mi'raz Imaduddin, 2000 : 17*) :

- a. Lebih dari 100% digolongkan tidak efisien.
- b. 90%-100% digolongkan kurang efisien.
- c. 80%-90% digolongkan cukup efisien..
- d. 60%-80% digolongkan efisien.
- e. Kurang dari 60% digolongkan sangat efisien.
- f.

4.5. Retribusi Terminal

Sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, tertuang didalamnya bahwa :

- a. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- b. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal.
- c. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas di lingkungan terminal.
- d. Obyek Retribusi adalah pungutan jasa pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah daerah di lingkungan terminal.

Retribusi Terminal tergolong dalam Retribusi Jasa usaha yang obyek retribusinya adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum disediakan oleh swasta.

Retribusi Terminal, yang bisa juga disebut sebagai Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis

umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, telah ditetapkan pula tarif pungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Struktur dan Tarif Retribusi Terminal
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004

Uraian	Tarif
AKAP (Angkutan Kota Antar Propinsi)	Rp. 1000,-
AKDP (Angkutan Kota Dalam Propinsi)	Rp. 500,-
ANGKUEDES (Angkutan Desa)	Rp. 300,-
ANGKOT (Angkutan Kota)	Rp. 200,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul 2004

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa data-data sekunder yang dapat penulis peroleh melalui studi kepustakaan dan dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga memperoleh data dari berbagai instansi yang terkait yaitu antara lain :

- a. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Gunungkidul.
- b. DLLAJR/ Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.
- c. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul.
- d. Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2 Metode Analisis Data

Sesuai dengan latar belakang masalah, perumusan dan beberapa tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan digunakan langkah-langkah metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Analisis Kontribusi

Dengan menggunakan analisis kontribusi ini, dapat diketahui berapa besar kontribusi retribusi terminal terhadap penerimaan PAD di Kabupaten

Gunungkidul, maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan retribusi terminal terhadap PAD. Besarnya kontribusi retribusi terminal terhadap PAD dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : (Nugroho Budiyo, 1995, 160)

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Dimana :

P_n = Kontribusi penerimaan retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

QX = Jumlah penerimaan Retribusi Terminal.

QY = Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

n = Tahun (periode) tertentu.

Dengan memakai analisis kontribusi , maka akan mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan membandingkan hasil analisis tersebut dan sesuai data yang ada yaitu selama lima tahun, akan diperoleh hasil analisis yang bervariasi yang menunjukkan kenaikan dan atau penurunan kontribusi juga dapat diketahui pula kontribusi yang terbesar dan kontribusi yang terkecil.

Kenaikan kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah akan mampu mendorong peningkatan PAD dan bila sebaliknya maka juga akan

menurunkan PAD. Sehingga bisa dibuktikan bahwa peranan Retribusi Terminal dalam meningkatkan PAD akan sesuai dengan kontribusinya, maka dengan begitu perlu dilakukan peningkatan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD melalui Retribusi Terminal.

2. Analisis Upaya Retribusi

Analisis ini membandingkan antara jumlah penerimaan retribusi terminal dengan kapasitas atau kemampuan membayar (*ability to pay*) retribusi terminal suatu daerah. Kapasitas bayar retribusi ini dapat ditunjukkan dengan besarnya angka PDRB. Upaya retribusi dapat diketahui dengan menggunakan rumus (*Nick Devas, 1998*) sebagai berikut :

$$\text{Upaya Retribusi} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi Terminal}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Dengan demikian upaya retribusi akan dapat menunjukkan seberapa besar usaha Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dalam memungut retribusi daerah dengan melihat upaya retribusi terminal.

3. Analisis Efektifitas

Efektifitas adalah hubungan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi terminal dengan target penerimaan retribusi terminal.

Pengukuran efektifitas dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode pengukuran

tingkat efektifitas yang merupakan perbandingan atau rasio antara realisasi penerimaan retribusi dengan penerimaan target retribusi yang ditetapkan. Bila diformulasikan dalam rumus adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\%$$

Efektifitas ini menyangkut semua tahap dalam administrasi penerimaan retribusi yaitu menentukan wajib retribusi, menetapkan tarif, memungut retribusi dan membukukan penerimaan (*Ahmad Sunardi, 2003, 56*).

Apabila nilai hasil perhitungan efektifitas mendekati 100% atau dengan kata lain semakin besar, maka retribusi terminal dapat dianggap semakin efektif, dan apabila sebaliknya, maka dapat dianggap semakin tidak efektif. Efektifitas ini akan dibandingkan dengan efektifitas pada tahun-tahun sebelumnya sehingga, dapat diketahui penerimaan retribusi terminal apakah sudah mencapai hasil efektifitas sesuai atau tidak dengan target yang sudah ditentukan.

4. Analisis Efisiensi

Efisiensi ini mengukur bagian dari hasil retribusi yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan retribusi yang bersangkutan (*Ahmad Sunardi, 2003, 55*). Efisiensi retribusi terminal berkaitan dengan besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan retribusi terminal itu sendiri.

Besarnya efisiensi retribusi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Terminal}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\%$$

Semakin kecil biaya pemungutan retribusi terminal terhadap realisasi penerimaan retribusi terminal berarti pemungutan retribusi terminal semakin efisien. Dengan kata lain, apabila hasil yang semakin efisien apabila nilai yang diperoleh dari perhitungan efisiensi menunjukkan prosentase yang semakin kecil dan sebaliknya apabila hasil perhitungannya semakin besar berarti semakin tidak efisien (*Fitriyah Nurlaili, 2004, 44*).

5. Analisis Trend

Analisis trend dilakukan untuk mengetahui perkiraan kemungkinan penerimaan retribusi terminal Kabupaten Gunungkidul pada tahun-tahun yang akan datang. Dalam perhitungan ini menggunakan analisis *time series* dengan persamaan trend sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n} \qquad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana :

Y' = Perkembangan Penerimaan Retribusi Terminal.

Y = Penerimaan Retribusi Terminal.

X = Skala Tahunan (variabel bebas)

n = Jumlah Tahun (sample)

Dengan mengadakan peramalan, seseorang atau suatu badan lebih mempunyai pandangan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan maupun untuk menetapkan anggaran keuangan di tahun berikutnya. Dengan menggunakan dasar data-data masa sebelumnya, dikumpulkan, kemudian dianalisa untuk meramalkan waktu yang akan datang. Data-data yang dikumpulkan dengan rangkaian waktu disebut dengan rangkaian waktu (*time series*)

Trend jangka panjang atau trend sekuler, yang sering disebut dengan trend, adalah suatu garis (trend) yang menunjukkan arah perkembangan secara umum. Trend ini bisa berbentuk garis lurus atau garis lengkung yang mempunyai kecenderungan menaik atau justru menurun. Namun kelemahan dari perhitungan menggunakan tren ini, adalah hasilnya cenderung selalu naik dari tahun ke tahun sedangkan belum tentu perkembangan penerimaan yang diperoleh dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Meski demikian, analisis ini tetap ada kelemahannya yaitu, pada perubahan tiap tahunnya yang selalu menunjukkan peningkatan. Hal itu sering pula tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pada tahun-tahun berikutnya

karena, penerimaan di dalam suatu daerah belum tentu selalu mengalami kenaikan. Sehingga kadang perhitungan untuk perkiraan target penerimaan pada tahun-tahun berikutnya mengalami ketidaksesuaian terhadap kenyataan yang ada.

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Analisis Data

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Kabupaten Gunungkidul mempunyai kewenangan yang sesuai dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk menyediakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai, upaya yang dilakukan untuk peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian

keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, salah satu dari sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan Antar Kota, Antar Propinsi, Pengelolaan, Pemeliharaan Fisik dan Ketertiban Terminal.

Dengan adanya penyerahan urusan sebagaimana tersebut diatas yang sesuai dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, maka penyelenggaraan Terminal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Menurut Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, struktur dan pengukuran besarnya tarif ditetapkan pada Bab 7 yaitu :

Pasal 10

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan/ fasilitas dan kendaraan.

Pasal 11

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Terminal Angkutan Penumpang :

Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan
-Bus Cepat (AKAP)	Rp. 1000,-	Sekali masuk
-Bus Lambat (AKDP)	Rp. 500,-	Sekali masuk
-Angkutan Pedesaan (Angkudes)	Rp. 300,-	Sekali masuk
-Angkutan Kota (Angkot)	Rp.200,-	Sekali masuk

b. Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal :

Jenis Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
-Kamar Kecil	Rp. 200,-	Sekali masuk
-Buang Air Besar/Mandi	Rp. 500,-	Sekali masuk
-Tempat Istirahat Pengemudi	Rp. 500,-	Sekali masuk

Pasal 12

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa penerimaan Retribusi Daerah lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dan penerimaan Retribusi Terminal yang melebihi target kecuali pada tahun 1999 dan

pada tahun 2003. Kinerja dari keberhasilan dalam pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain :

1. Tingkat kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dapat dihitung dengan membandingkan antara penerimaan Retribusi Terminal dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul yang dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan Retribusi Terminal dengan kemampuan masyarakat/penduduk Kabupaten Gunungkidul yang menggunakan PDRB sebagai tolak ukurnya.
3. Tingkat efektifitas dari pemungutan Retribusi Terminal yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Retribusi Terminal dan Target Retribusi Terminal yang telah ditetapkan.
4. Tingkat efisiensi dari pemungutan Retribusi Terminal, dapat diketahui dengan membandingkan besarnya biaya pemungutan Retribusi Terminal dengan realisasi Retribusi Terminal.
5. Menentukan dugaan/ramalan dengan menggunakan *Trend Least Square*, untuk mengetahui perkiraan besarnya penerimaan Retribusi Terminal untuk tahun-tahun yang akan datang.

6.2 Penerimaan PAD dan Retribusi Terminal

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan komponen yang sangat penting dalam peningkatan keuangan daerah.

Penerimaan PAD Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup berarti, perkembangan penerimaan PAD dan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari persentase pertumbuhan penerimaan per tahunnya. Perkembangan PAD dan Retribusi Terminal Kabupaten dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Pertumbuhan PAD dan Retribusi Terminal
Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Pertumbuhan PAD (%)	Retribusi Terminal (Rp)	Pertumbuhan Retribusi Terminal (%)
1999	5.409.513.658,49	-	55.266.000	-
2000	5.719.379.104,90	5,72	45.091.600	-18,40
2001	7.488.588.450,00	30,93	66.415.100	47,28
2002	13.486.859.839,85	80,09	74.626.400	12,36
2003	14.344.042.219,00	6,35	91.949.500	23,21

Sumber : BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

Dari tabel 6.1, menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Gunungkidul cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 kenaikan terjadi sebesar 5,72% yang berselisih jauh dari tahun 2001 yaitu naik sebesar 30,93%, hal itu disebabkan perhitungan tahun fiskal menjadi tahun kalender pada tahun 2000. Akibatnya, jumlah bulan pada perhitungan tahun 2000 hanya sejumlah 9 bulan sedangkan, pada tahun anggaran lainnya adalah 12 bulan. Dampak itu pun terlihat pada realisasi penerimaan Retribusi Terminal yang akhirnya mengalami penurunan sebesar 18,40% dan pada tahun 2001 penerimaan Retribusi Terminal mengalami kenaikan yang cukup berarti yaitu sebesar 47,28%. Kenaikan PAD pada tahun 2002 dinilai cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu 80%, sedangkan Retribusi Terminal mengalami kenaikan 12%. Pada tahun 2003 PAD mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,35% dan diiringi Retribusi Terminal yang mengalami kenaikan cukup berarti yaitu 23,21%. Perhitungan persentase pertumbuhan PAD dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2000} = \frac{5.719.379.104,90 - 5.409.513.658,49}{5.409.513.658,49} \times 100\% = 5,72\%$$

$$\text{Tahun 2001} = \frac{7.488.588.450,00 - 5.719.379.104,90}{5.719.379.104,90} \times 100\% = 30,93\%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{13.486.859.839,85 - 7.488.588.450,00}{7.488.588.450,00} \times 100\% = 80,09\%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{14.344.042.219,00 - 13.486.859.839,85}{13.486.859.839,85} \times 100\% = 6,35\%$$

Dari perhitungan tersebut, kenaikan terbesar PAD terjadi pada tahun 2002 yaitu 80,09% sedangkan kenaikan yang terkecil pada lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 5,72%.

Perhitungan persentase pertumbuhan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Retribusi Terminal} = \frac{RT_t - RT_{t-1}}{RT_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2000} = \frac{45.091.600 - 55.266.000}{55.266.000} \times 100\% = -18,40\%$$

$$\text{Tahun 2001} = \frac{66.415.100 - 45.091.600}{45.091.600} \times 100\% = 47,28\%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{74.626.400 - 66.415.100}{66.415.100} \times 100\% = 12,36\%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{91.949.500 - 74.626.400}{74.626.400} \times 100\% = 23,21\%$$

Dari perhitungan tersebut, terjadi fluktuasi pertumbuhan Retribusi Terminal yang cukup bervariasi dengan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2001 yaitu 47,28% sesudah terjadinya penurunan yang cukup besar pada tahun 2000 yaitu 18,40%.

6.3 Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap PAD

Retribusi Terminal adalah salah satu komponen Retribusi Daerah yang memberikan sumbangan yang cukup berarti pada Pendapatan Asli Daerah. Terminal merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan retribusi terminal terhadap PAD, menggunakan rasio antara jumlah retribusi terminal dengan PAD dikalikan 100%. Semakin besar nilai persentase kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah, semakin dinilai baik. Besar kontribusi Retribusi Terminal terhadap PAD di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 6.2
Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap PAD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Terminal (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1999	55.266.000	5.409.513.658,49	1,02%
2000	45.091.600	5.719.379.104,90	0,78%
2001	66.415.100	7.488.588.450,00	0,88%
2002	74.626.400	13.486.859.839,85	0,55%
2003	91.949.500	14.344.042.109,00	0,64%

Sumber : BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

Kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Dimana :

P_n = Kontribusi Penerimaan Retribusi Terminal Terhadap PAD

QX = Penerimaan Retribusi Daerah

QY = Penerimaan PAD

n = Tahun/Periode Tertentu

Perhitungan kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 1999} = \frac{55.266.000}{5.409.513.658,49} \times 100\% = 1,02\%$$

$$\text{Tahun 2000} = \frac{45.091.600}{5.719.379.104,90} \times 100\% = 0,78\%$$

$$\text{Tahun 2001} = \frac{66.415.100}{7.488.588.450,00} \times 100\% = 0,88\%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{74.626.400}{13.486.859.839,85} \times 100\% = 0,55\%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{91.949.500}{14.344.042.219,00} \times 100\% = 0,64\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi yang bervariasi antara 0,55% sampai dengan 1,02% dan dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 0,774%. Kontribusi yang terbesar terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 1,02%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu 0,55%. Pada tahun 2000 kontribusi Retribusi Terminal terhadap PAD sebesar 0,78%, tahun 2001 sebesar 0,88%, sedangkan pada tahun 2003 sebesar 0,64%. Dari tahun 1999 sampai tahun 2000 kontribusi Retribusi Terminal terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 0,24%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2001 sebesar 0,1% dan tahun berikutnya yaitu tahun 2002 justru mengalami penurunan sebesar 0,33%, sedangkan pada tahun 2003 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,09%.

6.4 Upaya Pemungutan Retribusi Terminal

Tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal perlu diketahui untuk mengukur besar upaya yang telah dilakukan dalam pemungutan Retribusi Terminal itu sendiri dengan memperhatikan kemampuan masyarakatnya menggunakan tolak ukur PDRB Kabupaten Gunungkidul.

Upaya Retribusi Terminal dapat diketahui dengan membandingkan antara jumlah penerimaan Retribusi Terminal dengan kemampuan bayar (*ability to pay*) retribusi terminal oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang ditunjukkan dengan besarnya PDRB Kabupaten Gunungkidul.

Tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 6.3
Tingkat Upaya Pemungutan Retribusi Terminal
Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003
(Juta Rupiah)

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Terminal (Rp)	PDRB (harga konstan) (Rp)	Tingkat Upaya (%)
1999	55,2660	905.619	0,006
2000	45,0916	930.496	0,004
2001	66,4151	950.887	0,006
2002	74,6264	968.908	0,007
2003	91,9495	989.017	0,009

Sumber : BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

Tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 1999} = \frac{55,266}{905.619} \times 100\% = 0,006\%$$

$$\text{Tahun 2000} = \frac{45,0916}{930.496} \times 100\% = 0,004\%$$

$$\text{Tahun 2001} = \frac{66,4151}{950.887} \times 100\% = 0,006\%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{74,6264}{968.908} \times 100\% = 0,007\%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{91,9495}{989.017} \times 100\% = 0,009\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa, tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal cenderung mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir. Penurunan yang terjadi pada tahun 2000 disebabkan oleh perubahan perhitungan tahun fiskal menjadi tahun kalender, yang semula pada tahun 1999 tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal sebesar 0,006% turun menjadi 0,004% pada tahun 2000. Sedangkan peningkatan dimulai pada tahun 2001 hingga tahun 2003 yaitu sebesar 0,006% pada tahun 2001, 0,007% pada tahun 2002 dan 0,009% pada tahun 2003. Rata-rata tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,006% tiap tahunnya. Tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul yang tertinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 0,009% dan yang terendah pada tahun 2000 yaitu

sebesar 0,004%. Sehingga kemampuan bayar (*ability to pay*) Retribusi Terminal oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul, rata-rata 0,006% per tahunnya.

6.5 Efektifitas Retribusi Terminal

Tingkat efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Retribusi Terminal dengan target Retribusi Terminal yang sebelumnya telah ditetapkan. Apabila hasil perhitungan efektifitas Retribusi Terminal mendekati 100% maka kinerja pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul semakin baik. Dalam penelitian ini, yang dipertimbangkan dalam menentukan efektifitas adalah pencapaian target dan tujuan lain seperti, keadilan, ketepatan waktu pembayaran dan kepastian hukum diabaikan. Efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul tahun 1999-2003 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6.4

**Efektifitas Retribusi Terminal
Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003**

Tahun Anggaran	Target Retribusi Terminal (Rp)	Realisasi Retribusi Terminal (Rp)	Efektifitas Retribusi Terminal (%)
1999	59.688.000	55.266.000	92,59
2000	44.766.000	45.091.600	100,72
2001	65.664.000	66.415.100	101,14
2002	72.900.000	74.626.400	102,36
2003	96.860.000	91.949.500	94,93

Sumber : BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

Efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 1999} = \frac{55266.000}{59.688.000} \times 100\% = 92,59\%$$

$$\text{Tahun 2000} = \frac{45.091.600}{44.766.000} \times 100\% = 100,72\%$$

$$\text{Tahun 2001} = \frac{66.415.100}{65.664.000} \times 100\% = 101,14\%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{74.626.400}{72.900.000} \times 100\% = 102,36\%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{91.949.500}{96.860.000} \times 100\% = 94,93\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul pada tahun anggaran 1999 sampai dengan tahun 2003 cenderung mengalami kenaikan yaitu antara 92,59% sampai dengan 147,61%. Pada tahun 1999 tingkat efektifitas pajak hiburan Kabupaten Gunungkidul sebesar 92,59%, sedangkan pada tahun 2000 efektifitasnya naik sebesar 100,72%, kemudian pada tahun 2001 efektifitasnya naik sebesar 101,14% dan pada tahun 2002 efektifitasnya juga mengalami kenaikan sebesar 102,36% dan merupakan tingkat efektifitas yang tertinggi selama kurun waktu 1999 sampai dengan 2003. Kemudian pada tahun 2003 efektifitasnya justru mengalami penurunan dengan tingkat efektifitas sebesar 94,93%. Efektifitas terendah selama

lima tahun terakhir adalah pada tahun 1999 yaitu dengan tingkat efektifitas sebesar 92,59%.

Dengan rata-rata tingkat efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul sebesar 98,348% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul sudah cukup baik, karena sebagian besar realisasi penerimaan Retribusi Terminal selalu lebih dari target yang direncanakan kecuali, pada tahun 1999 dan tahun 2003 yang realisasinya penerimaan Retribusi Terminal lebih kecil dari target yang telah direncanakan. Namun, meskipun kurang dari target yang direncanakan penerimaan Retribusi Terminal sudah dapat dikatakan cukup efektif karena tingkat efektifitasnya mendekati 100% yaitu sebesar 92,59% dan 94,93%. Menurunnya tingkat efektifitas pada tahun 2003 lebih disebabkan oleh karena meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan sedikitnya angkutan umum yang beroperasi.

6.6 Efisiensi Retribusi Terminal

Efisiensi Retribusi Terminal dapat dihitung dengan cara membandingkan antara biaya pemungutan Retribusi Terminal dengan realisasi penerimaan Retribusi Terminal. Apabila hasil perhitungan semakin kecil maka semakin efisien pemungutan Retribusi Terminal. Dengan semakin efisien pemungutan

Retribusi Terminal, maka kinerja pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul akan semakin baik.

Besarnya biaya pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar 10% dari target penerimaan Retribusi Terminal yang telah ditetapkan. Hal itu dikarenakan biaya pemungutan yang tidak dapat dihitung secara rinci, karena banyaknya biaya yang tidak dapat dinominalkan, sehingga ketidaksesuaian biaya yang telah ditetapkan dengan biaya sesungguhnya diabaikan.

Tingkat efisiensi Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.5
Efisiensi Retribusi Terminal
Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Retribusi Terminal (Rp)	Efisiensi Retribusi Terminal (%)
1999	5.968.800	55.266.000	10,80
2000	4.476.600	45.091.600	9,92
2001	6.566.400	66.415.100	9,88
2002	7.290.000	74.626.400	9,76
2003	9.686.000	91.949.500	10,53

Sumber : BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

Efisiensi dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus sebagai

berikut :

$$\text{Tahun 1999} = \frac{5.968.800}{55.266.000} \times 100\% = 10,80\%$$

$$\text{Tahun 2000} = \frac{4.476.600}{45.091.600} \times 100\% = 9,92\%$$

$$\text{Tahun 2001} = \frac{6.566.400}{66.415.100} \times 100\% = 9,98\%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{7.290.000}{74.626.400} \times 100\% = 9,76\%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{9.686.000}{91.949.500} \times 100\% = 10,53\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi Retribusi Terminal dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 bervariasi antara 9,97% sampai dengan 10,80%. Rata-rata tingkat efisiensinya sebesar 10,178% tiap tahunnya. Pada tahun 1999 tingkat efisiensi Retribusi Terminal sebesar 10,80%, pada tahun 2000 efisiensinya meningkat menjadi sebesar 9,92%, sedangkan pada tahun 2001 mengalami peningkatan efisiensi lagi menjadi sebesar 9,88% dan pada tahun 2002 efisiensi mengalami peningkatan lagi menjadi sebesar 9,76% yang merupakan tingkat efisiensi yang paling baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2003 efisiensi Retribusi Terminal justru mengalami penurunan menjadi sebesar 10,53%. Tingkat efisiensi yang paling rendah adalah pada tahun 1999. kondisi yang terendah tersebut disebabkan oleh

dampak krisis moneter yang menyebabkan kurs rupiah menurun dan masih membekas di tahun 1999, sedangkan rendahnya tingkat efisiensi pada tahun 2003 rendah disebabkan oleh sedikitnya angkutan umum yang beroperasi seiring dengan kenaikan BBM dan kendaraan angkutan umum yang sudah tidak layak beroperasi lagi.

6.7 Analisis Trend

Digunakan analisis trend, untuk mengetahui perkiraan perkembangan penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul pada tahun-tahun yang akan datang dengan menggunakan analisis *time series*, maka dapat digunakan persamaan trend sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Nilai a dan b dapat diperoleh dari rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{n} \qquad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana :

Y' : Perkembangan Penerimaan Retribusi Terminal

Y : Penerimaan Retribusi Terminal

X : Skala Tahun

n : Jumlah Sampel

Perhitungan trend linier penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul tahun 1999 sampai dengan pada tahun 2003 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.6

**Perhitungan Trend Linier Penerimaan Retribusi Terminal
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 1994-2003**

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Terminal (Y)	X	XY	X²
1994	68.081.900	-4,5	- 306.368.550	20,25
1995	47.181.300	-3,5	-165.134.550	12,25
1996	50.961.600	-2,5	-127.404.000	6,25
1997	54.681.000	-1,5	-82.021.500	2,25
1998	53.891.300	-0,5	-26.945.650	0,25
1999	55.266.000	0,5	27.633.000	0,25
2000	45.091.600	1,5	67.637.400	2,25
2001	66.415.100	2,5	166.037.750	6,25
2002	74.626.400	3,5	261.192.400	12,25
2003	91.949.500	4,5	413.772.750	20,25
Jumlah	608.145.700	0	228.399.050	82,50

Sumber : BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

Dari perhitungan diatas, dapat dihitung nilai a dan b dengan rumus sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{608.145.700}{10} = 60.814.570$$

$$b = \frac{228.399.050}{82,50} = 2.768.473,33$$

Jadi persamaan trend untuk penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

$$Y' = 61.814.570 + 2.768.473,33(X)$$

Dari persamaan trend di atas, maka prediksi/proyeksi penerimaan Retribusi Terminal untuk tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 6.7

**Proyeksi Penerimaan Retribusi Terminal
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004-2013**

No	Tahun Anggaran	Proyeksi Penerimaan Retribusi Terminal (Rp)
1	2004	76.041.173,32
2	2005	78.809.646,65
3	2006	81.578.119,98
4	2007	84.346.593,31
5	2008	87.115.066,64
6	2009	89.883.539,97
7	2010	92.652.013,30
8	2011	95.420.486,63
9	2012	98.188.959,96
10	2013	100.957.433,3

Proyeksi dapat diketahui dengan perhitungan persamaan trend berikut :

- Tahun anggaran 2004 :

$$Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(5,5)$$

$$= 60.814.570 + 15.226.603,32$$

$$= 76.041.173,32$$

- Tahun anggaran 2005 :

$$Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(6,5)$$

$$= 60.814.570 + 17.995.076,65$$

$$= 78.809.646,65$$

- Tahun anggaran 2006 :

$$Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(7,5)$$

$$= 60.814.570 + 20.763.549,98$$

$$= 81.578.119,98$$

- Tahun anggaran 2007 :

$$Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(8,5)$$

$$= 60.814.570 + 23.532.023,31$$

$$= 84.346.593,31$$

- Tahun anggaran 2008 :

$$Y' = 60.814.570 + 2.768.473,33(9,5)$$

$$= 60.814.570 + 26.300.496,64$$

$$= 87.115.066,64$$

- Tahun anggaran 2009 :

$$\begin{aligned} Y' &= 60.814.570 + 2.768.473,33(10,5) \\ &= 60.814.570 + 29.068.969,97 \\ &= 89.883.539,97 \end{aligned}$$

- Tahun anggaran 2010 :

$$\begin{aligned} Y' &= 60.814.570 + 2.768.473,33(11,5) \\ &= 60.814.570 + 31.837.443,30 \\ &= 92.652.013,30 \end{aligned}$$

- Tahun anggaran 2011 :

$$\begin{aligned} Y' &= 60.814.570 + 2.768.473,33(12,5) \\ &= 60.814.570 + 34.605.916,63 \\ &= 95.420.486,63 \end{aligned}$$

- Tahun anggaran 2012 :

$$\begin{aligned} Y' &= 60.814.570 + 2.768.473,33(13,5) \\ &= 60.814.570 + 37.374.389,96 \\ &= 98.188.959,96 \end{aligned}$$

- Tahun anggaran 2013 :

$$\begin{aligned} Y' &= 60.814.570 + 2.768.473,33(14,5) \\ &= 60.814.570 + 39.707.863,30 \\ &= 100.522.433,30 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Terminal untuk tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan, sehingga Retribusi Terminal juga perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius untuk mengoptimalkan penerimaannya. Metode analisis *Trend Least Square* ini dapat dijadikan metode alternatif yang dapat dipakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menentukan tingkat target penerimaan Retribusi Terminal maupun Pendapatan Asli Daerah lainnya. Metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menentukan target penerimaan Retribusi Terminal selama ini memakai metode pendataan secara langsung turun ke lapangan. Meskipun metode ini hasilnya mendekati kebenaran, namun dirasa kurang efisien karena harus mengeluarkan biaya. Sehingga dengan menggunakan metode analisis trend ini, dengan cukup menghitung target penerimaan Retribusi Terminal berdasar dari penerimaan tahun-tahun sebelumnya serta dapat meminimalisasi biaya penelitian.

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dan dari hasil analisis data yang penulis peroleh dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 1999-2003 dirasa masih belum cukup maksimal. Kontribusi Retribusi Terminal pada lima tahun terakhir ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002 mengalami penurunan yang cukup berarti yaitu sebesar 0,55%. Kontribusi yang terbesar justru terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 1,02%. Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul memberikan sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata sebesar 0,77%.
2. Pada perhitungan tingkat upaya terlihat bahwa tiap tahunnya mengalami kenaikan kecuali, pada tahun 2000 yang disebabkan perubahan perhitungan tahun fiskal menjadi perhitungan tahun kalender. Tingkat upaya yang terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 0,004%, sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 0,009%. Rata-rata upaya pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten

Gunungkidul tiap tahunnya sebesar 0,006%. Hal itu menunjukkan bahwa tiga tahun terakhir, kemampuan bayar (*ability to pay*) Retribusi terminal oleh masyarakat Gunungkidul semakin meningkat.

3. Efektifitas Retribusi Terminal lima tahun terakhir di Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi, meski sebagian besar mengalami kenaikan, penurunan terjadi pada tahun 1999 dan tahun 2003. Efektifitas terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 92,59% dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 102,36%. Rata-rata efektifitas Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul tiap tahunnya sebesar 98,348% dan semuanya digolongkan dalam kinerja pemungutan Retribusi Terminal yang efektif.
4. Tingkat efisiensi Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, berkisar antara 9,76% sampai dengan 10,80%. Berdasarkan perhitungan efisiensi, Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul dapat digolongkan pada tingkatan yang sangat efisien karena, hasil perhitungan kurang dari 60%. Rata-rata tingkat efisiensi tiap tahunnya sebesar 10,178%. Dengan demikian kinerja pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul sudah baik, karena semakin kecil tingkat efisiensi, maka semakin efisien kinerja dalam pemungutan Retribusi Terminal.

5. berdasarkan pada hasil perhitungan analisis trend, dapat diperkirakan bahwa penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul pada tahun-tahun yang akan datang akan terus mengalami peningkatan. Dengan menggunakan analisis ini, dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Gunungkidul untuk mempermudah dalam menentukan target penerimaan Retribusi Terminal di tahun yang akan datang.

7.2 Implikasi

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul hendaknya menaikkan Retribusi Terminal diimbangi dengan peningkatan pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana guna kenyamanan pengguna jasa terminal, juga diberlakukannya sistem pemungutan retribusi peron terhadap penumpang di Terminal. Sehingga akan terwujud peningkatan penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul.
2. Dinas Perhubungan hendaknya membentuk organisasi khusus dalam pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul, agar dapat menunjang efektifitas kinerja Dinas Perhubungan dalam mengelola Retribusi Terminal. Sehingga bisa mewujudkan keteraturan kerja, apabila terdapat petugas yang khusus dalam menangani Retribusi terminal di Kabupaten Gunungkidul.

3. Diperlukan adanya sosialisasi penetapan jalur baru kepada masyarakat dan pengusaha jasa angkutan, serta perlu adanya penindakan/penegakan hukum secara tegas kepada para pelanggar peraturan perundangan di bidang lalu lintas, baik terhadap angkutan umum maupun kendaraan pribadi yang dioperasikan untuk mengangkut penumpang umum serta unsur pelanggaran lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, Nugroho, 2001, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dati II Klaten Tahun Anggaran 1983/1984-1999/2000*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Prakosa, Kesit, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Dwisaputra, Wahyu, 2003, *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Suatu Penelitian di Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan), Jurusan Ilmu Pemerintahan, APMD, Yogyakarta.
- Gunungkidul Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul Kerjasama dengan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul.
- Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000*, Bagian Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Intensifikasi Pendapatan Daerah dan Desa*, 2003, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2001.
- Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 207 tahun 2002.
- Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Nomor 006 Tahun 2002.
- Mangkusubroto, Guritno, 2001, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Nurlaili, Fitriyah, 2004, *Peran Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Pamungkas, Sri-Bintang, 2001, *Dari Orde Baru Lewat Reformasi Total*, Erlangga, Jakarta.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001-2005, 2001, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Sukirno, Sadono, 1985, *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan)*, FE UI dan Bima Grafika, Jakarta.

Sunardi, Ahmad, 2003, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retribusi Terminal di Kota Magelang*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999.

LAMPIRAN

Gambar 4.1

Sistem Jaringan Jalan & Sarana
Transportasi tahun 2000
di Perkotaan Satelit Wonosari
Legenda

Batas Administrasi

- Garis Desa
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Kabupaten
- - - - - Batas Kecamatan

Konfigurasi Jalan

- Jalan Aspal
- Jalan Perintis
- Jalan Perintis
- Jalan Perintis

Fungsi Jalan

- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer

Batas UATZ

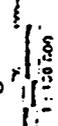
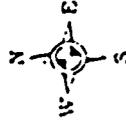
- APIL
- Terminasi

Kondisi sarana transportasi

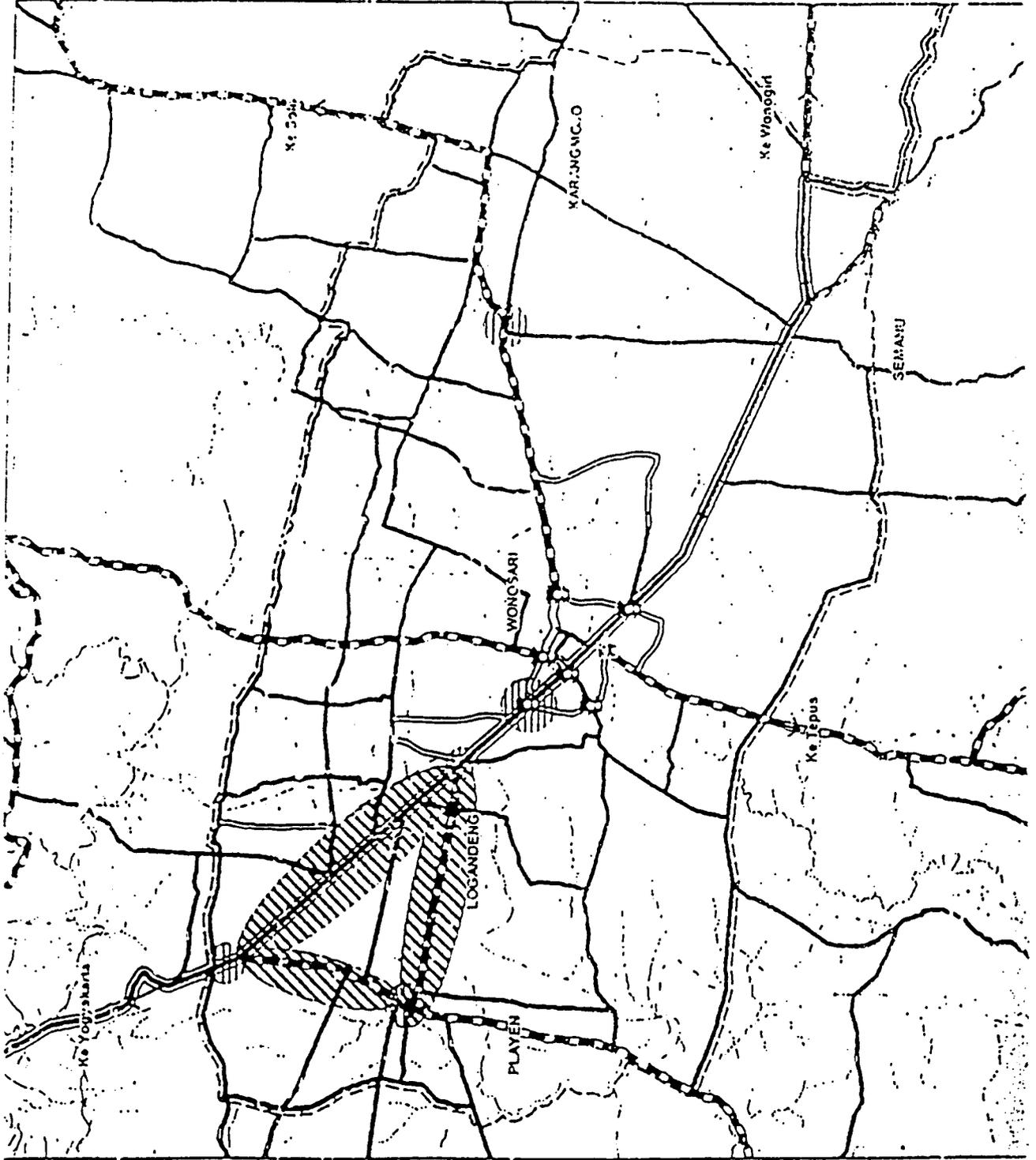
- Fasilitas



Pertambangan kurasang



30° 10' 00" S 101° 00' 00" E

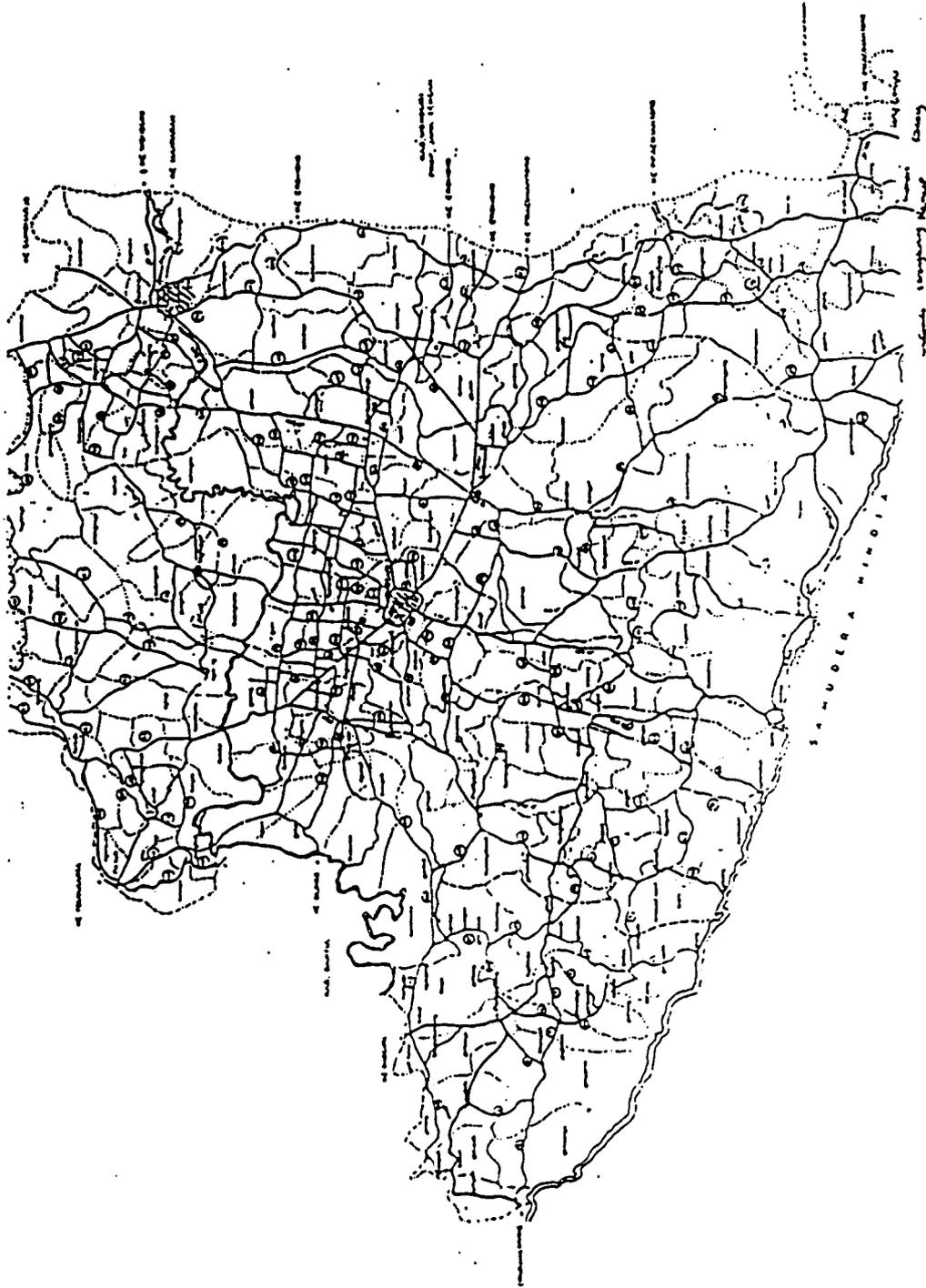




DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PETA JARINGAN TRAYEK
ANGKUTAN PERDESAAN
KAB. GUNUNGKIDUL

TANPA SKALA
KETERANGAN



LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 006/KPTS/2002.
Tanggal : 23 September 2002.

PENETAPAN JUMLAH KENDARAAN PADA TIAP JALUR TRAYEK
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

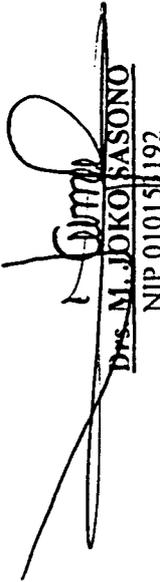
NOMOR JALUR	JALUR TRAYEK	RUTE LINTASAN TRAYEK	JUMLAH KENDARAAN
1	2	3	4
1	WONOSARI – DUWET Lewat MIJAHAN	Terminal Wonosari – Mijahan – Jonge – Wangen – Duwet PP.	9
2	WONOSARI – JONGE Lewat SEMANU	Terminal Wonosari – Nitikan – Munggi Pasar – Jetis – Jonge PP.	5
3	WONOSARI – BINTAOS Lewat SEMANU	Terminal Wonosari – Semanu – Sumur – Tunggul – Panggul – Ploso – Sumberwungu – Cari – Bintaos PP.	6
4	WONOSARI – JEPITU Lewat GIRIPANGGUNG	Terminal Wonosari – PUSKESMAS Semanu – Tunggul – Panggul – Giripanggung – Jepitu PP.	31
5	WONOSARI – PONJONG Lewat MUNGGI	Terminal Wonosari – Semanu – Karangayu – Jetis – Karangmojo – Warungayu – Ponjong PP.	8
6	WONOSARI – BARAN Lewat NGENEP – PAKEL	Terminal Wonosari – Semanu – Sumur – Ngebrak – Semuluh– Dadapayu– Ngenep– Petir– Pringombo– Pakel – Baran PP.	16
7	WONOSARI – JEPITU Lewat PUCANGANOM	Terminal Wonosari – Semanu– Ngeposari – Semuluh – Gombang – Kayangan – Pucanganom – Petir – Botodayaan – Jepitu PP.	10
8	WONOSARI – PONJONG Lewat NGEPOSARI	Terminal Wonosari – Semanu – Ngeposari – Sidorejo – Ponjong PP.	10

1	2	3	4
9	WONOSARI – SADENG Lewat SEMULUH - BARAN 9.A. WONOSARI – BARAN Lewat SEMULUH 9.B. BARAN – SADENG	Terminal Wonosari – Semanu – Ngeposari – Semuluh – Gombang – Bedoyo – Baran – Ngrancah – Pucung – Sadeng PP. Terminal Wonosari – Semanu – Ngeposari – Semuluh – Gombang – Bedoyo – Baran PP. Baran – Ngrancah – Pucung – Sadeng PP.	4 - 28 13
10	WONOSARI – JEPITU Lewat PAKCUCAK – BARAN 10.A. WONOSARI – BARAN Lewat PAKCUCAK 10.B. BARAN – JEPITU Lewat TILENG 10.C. BARAN – JEPITU Lewat PLOSO	Terminal Wonosari – Semanu – Ngeposari – Pakcucak – Bedoyo – Baran – Nglindur – Tileng – Karangawen – Jepitu PP. Terminal Wonosari – Semanu – Ngeposari – Pakcucak – Bedoyo – Baran PP. Baran – Nglindur – Tileng – Karangawen – Jepitu PP. Baran – Nglindur – Tekik – Ploso – Karangawen – Jepitu PP.	- 19 10 5
11	WONOSARI – JEPITU Lewat TEPUS	Terminal Wonosari – Mulo – Mentel – Bintaos – Tepus – Purwodadi – Balong – Jepitu – PP.	35
12	WONOSARI – KEMIRI Lewat KERUK	Terminal Wonosari – Mulo – Mentel – Keruk – Kemiri PP.	7
13	WONOSARI – KEMIRI Lewat BINTAOS – WALIKANGIN	Terminal Wonosari – Mulo – Mentel – Bintaos – Walikangin – Banjarejo – Padangan – Wonosobo – Kemiri PP.	10
14	WONOSARI – BINTAOS Lewat KEMIRI – BANJAREJO	Terminal Wonosari – Mulo – Karangasem – Kemiri – Padangan – Banjarejo – Walikangin – Bintaos PP.	6
15	WONOSARI – NGRENEHAN Lewat KEMADANG	Terminal Wonosari – Mulo – Karangasem – Kemiri – Kemadang – Planjan – Monggol – Trowono – Ngrenehan PP.	5
16	WONOSARI – BARON	Terminal Wonosari – Mulo – Kemiri – Kemadang – Baron PP.	24
17	WONOSARI – PALIYAN Lewat PULUTAN – GROGOL	Terminal Wonosari – Siraman – Pulutan – Wiyoko – Grogol – Paliyan PP.	14
18	WONOSARI – PANGGANG – GIIRICAHYO Lewat SODO	Terminal Wonosari – Siraman – Sodo – Mulusan – Paliyan – Trowono – Jetis – Legundi – Panggang – Giripurwo – Giricahyo PP.	51

1	2	3	4
19	WONOSARI – PALIYAN Lewat PAMPANG	Terminal Wonosari – Siraman – Wareng – Pampang – Paliyan PP.	4
20	WONOSARI – NGRENEHAN Lewat SINGKIL	Terminal Wonosari – Siraman – Wareng – Sodo – Giring – Singkil – Planjan – Sumber – Ngresik – Gedangklutuk – Kanigoro – Ngrenehan PP.	10
21	WONOSARI – GETAS Lewat PLAYEN	Terminal Wonosari – Siyono – Bogor – Playen – Ngawu – Wonorejo – Getas PP	14
22	WONOSARI – MENGGORA Lewat DENGOK	Terminal Wonosari – Siyono – Bogor – Playen – Dengok – Bleberan – Banyusoco – Menggora PP.	18
23	WONOSARI – MENGGORA Lewat PALIYAN	Terminal Wonosari – Siyono – Playen – Grogol – Paliyan – Surulanang – Menggora PP.	46
24	WONOSARI – GETAS Lewat BANDUNG – GADING	Terminal Wonosari – Siyono – Bandung – Gading – Banaran – Ngleri – Getas PP.	18
25	WONOSARI – PLAYEN Lewat GADING	Terminal Wonosari – Siyono – Bandung – Gading – Tompak – Playen PP.	5
26	WONOSARI – KARANGTENGGAH Lewat GADING	Terminal Wonosari – Siyono – Gading – Beji – Ngijorejo – Gatak – Karangtengah PP	11
27	WONOSARI – GEDANGSARI Lewat SAMBIPITU	Terminal Wonosari – Gading – Sambipitu – Nglegi – Plosodoyong – Hargomulyo – Mertelu PP.	11
28	WONOSARI – NGLIPAR Lewat SAMBIPITU	Terminal Wonosari – Gading – Sambipitu – Ngalang – Nglegi – Sendowo – Nglipar PP.	13
29	WONOSARI – NGORO-ORO Lewat BEJI – PENGKOK	Terminal Wonosari – Gading – Sambipitu – Kerjan – Beji – Pengkok – Patuk – Ngoro-oro PP.	9
30	WONOSARI – SEMIN Lewat NGLIPAR – NGLEBAK	Terminal Wonosari – Karangtengah – Nglipar – Mengger – Nglebak – Wotgaleh – Beji – Kalilunyu – Bendung – Semin PP	10
31	WONOSARI – SOKOLIMAN Lewat WOTGALEH	Terminal Wonosari – Karangtengah – Nglipar – Kedungpoh – Wotgaleh – Nglebak – Klayar – Kedungranti – Sokoliman PP	11
32	WONOSARI – SEMIN Lewat NGLIPAR – BLUTAK	Terminal Wonosari – Karangtengah – Nglipar – Kedungpoh – Natah – Beji – Ngawen – Blutak – Semin PP.	23
33	WONOSARI – SEMIN Lewat NGLIPAR – BENDUNG	Terminal Wonosari – Karangtengah – Nglipar – Kedungpoh – Beji – Ngawen – Widoro – Bendung – Semin PP.	18

1	2	3	4
34	WONOSARI – SOKOLIMAN Lewat GROGOL	Terminal Wonosari – Grogol – Bejiharjo – Gelaran - Gunungbang – Sokoliman PP.	10
35	WONOSARI – SOKOLIMAN Lewat NGAWIS	Terminal Wonosari – Ngawis – Karanganom – Munggur – Sokoliman PP.	8
36	WONOSARI – PONJONG Lewat UMBULREJO – SUMBERGIRI	Terminal Wonosari – Karangmojo – Warungayu – Umbulrejo – Sumbergiri – Ponjong PP.	10
37	WONOSARI- TAMBAKROMO Lewat PONJONG – SUMBERGIRI	Terminal Wonosari – Karangmojo – Ponjong – Sumbergiri - (Sawahana – Tambakromo PP.	19
38	WONOSARI – BEDOYO Lewat NGIPAK – KENTENG	Terminal Wonosari – Kelor – Ngipak – Srimpi - Ponjong – Kenteng – Karangasem – Bedoyo PP.	12
39	WONOSARI – SEMIN Lewat WATUSIGAR	Terminal Wonosari – Karangmojo – Jatiayu – Watusigar – Sambeng – Tobong – Candirejo – Semin PP.	10
40	WONOSARI – SEMIN Lewat KALIALANG	Terminal Wonosari – Karangmojo – Jatiayu – Kalialang – Semin PP.	36
		JUMLAH KENDARAAN	650

Wonosari, 23 September 2002.
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL


 Drs. M. JOKO SASONO
 NIP.010150192.

REKAPITULASI DATA ANGGUKATAN KOTA
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO	NO JALUR	JALUR TRAYEK	TAHUN 2003						TAHUN 2004						
			JANUARI		FEBRUARI		JANUARI		FEBRUARI						
			BUS	MPU	JUMLAH	BUS	MPU	JUMLAH	BUS	MPU	JUMLAH	BUS	MPU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	A	TERMINAL - S3 JL. BARON - S4 JL. DR WAHIDIN SUDIRO HUSODO - S5 BALEHARJO - S4 BALEHARJO - S4 SELANG - S3 BRANANG - S3 KODIM - S4 RSUD - S3 PASAR BAMBU - JL KH AGUS SALIM - JL. NUSANTARA - S4 KEMOROSARI - SIYONO - S3 KRANON - S4 BALAI DESA KEPEK - KANTOR POS - S3 PASAR BAMBU - S4 RSUD - S3 KODIM - S3 BRANANG - S5 BALEHARJO - S4 JL. WAHIDIN SUDIRO HUSODO - S3 JL BARON - TERMINAL TERMINAL - JL. TENTARA PELAJAR - S4 BALAI DESA KEPEK - S3 KRANON - JL AGUS SALIM - S4 SIYONO - S4 KEMOROSARI - S4 BUDEGAN - S4 RSUD - S3 KODIM - JL SUMARWI - S3 BESOLE - JL MGR SUGIYO PRANOTO - S5 BALEHARJO - S4 BALEHARJO - S4 JLN WAHIDIN S - S3 JL. BARON - TERMINAL TERMINAL - JL. BARON - S4 JLN WAHIDIN S - S5 BALEHARJO S3 BRANANG - S3 KODIM - S4 RSUD - S4 BUDEGAN - S4 KEMOROSARI - S3 NUSANTARA - S4 SIYONO - JL KYAI LEGI - S3 PANCORAN - S4 BALAI DESA KEPEK - KANTOR POS - S3 PS BAMBU - S4 RSUD - S3 KODIM - S3 BRANANG - S5 BALEHARJO - JLN MGR SUGIYO PRANOTO - S3 BESOLE - TERMINAL TERMINAL - JL. TENTARA PELAJAR - S4 BALAI DESA KEPEK - JL VETERAN - KANTOR POS - S3 KRANON - JL. AGUS SALIM - S4 SIYONO - S4 KEMOROSARI - S4 BUDEGAN - S4 GROGOL - BONG CHINO - S3 TAWARSARI - S3 KODIM - JL. SUMARWI - S3 BESOLE - JL BARON - TERMINAL TERMINAL - S3 JL. BARON - S4 JL WAHIDIN S - S5 BALEHARJO - S3 BRANANG - S3 TAWARSARI - BONG CHINO - S4 GROGOL - S4 BUDEGAN - S4 RSUD - JL. MASJID - S3 PENGGADEAN - S3 KRANON - S4 SIYONO - S3 KRANON - PASAR BAMBU - S4 RSUD - S3 KODIM - S3 BRANANG - S4 SELANG - S4 BALEHARJO - S5 BALEHARJO - JLN MGR SUGIYO PRANOTO - S3 BESOLE - TERMINAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	B			8	8		8	8		8	8		8	8	
3	C			8	8		8	8		8	8		8	8	
4	D			8	8		8	8		8	8		8	8	
5	E			8	8		8	8		8	8		8	8	